



Artikulasi **POLITIK KIAI NU**

Pada Masa Transisi Demokrasi

AHIDUL ASROR

Dr. Ahidul Asror, M.Ag.

Artikulasi
POLITIK KIAI NU

Pada Masa Transisi Demokrasi



ARTIKULASI POLITIK KIAI NU

Pada Masa Transisi Demokrasi

Hak penerbitan ada pada STAIN Jember Press

Hak cipta dilindungi undang-undang

All rights reserved

Penulis:

Dr. Ahidul Asror, M.Ag.

Editor:

H. Nur Solikin, S.Ag., M.H

Layout:

Khoiruddin

Cetakan I:

Agustus 2013

Foto Cover:

Internet

Penerbit:

STAIN Jember Press

Jl. Jumat Mangli 94 Mangli Jember

Tlp. 0331-487550 Fax. 0331-427005

e-mail: stainjember.press87@gmail.com

ISBN: 978-602-1640-09-8

Isi diluar tanggung jawab penerbit

PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah, dengan segala kerendahan hati syukur dan puji hanyalah bagi Allah SWT yang telah menempa segala Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya, sehingga penulis merasa mendapatkan kesempatan, peluang, dan kekuatan yang berupa kesanggupan dan kemampuan untuk menyelesaikan tulisan yang sederhana ini. Hal ini, merupakan anugerah terbesar bagi penulis untuk tetap mengaktualisasikan khasanah intelektualitas secara profesi dan akademis sebagai menambah pengalaman dalam berkarya.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke alam perubahan untuk mengadakan reformasi total (*kaffah*) dengan misi pencerahan umat manusia sebagai rah-

mat bagi sekalian alam.

Selanjutnya tiada kata yang patut penulis haturkan kecuali rasa beribu-ribu terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dengan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya, sehingga tulisan yang sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan ini dapat terselesaikan, semoga Allah membalasnya. Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tulisan ini dimungkinkan masih jauh dari yang diharapkan serta terdapat banyak kekurangan, sehingga kritik dan perbaikan dari sahabat pembaca sangat penulis harapkan sebagai percikan pemikiran menuju perbaikan dalam penulisan-penulisan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis memohon dan berserah diri.

Jember, Agustus 2013
Penulis

PENGANTAR KETUA STAIN JEMBER

Sejatinya, perguruan tinggi bukan sekedar lembaga pelayanan pendidikan dan pengajaran, tetapi juga sebagai pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. STAIN Jember sebagai salah satu pusat kajian berbagai disiplin ilmu keislaman, selalu dituntut terus berupaya menghidupkan budaya akademis yang berkualitas bagi civitas akademiknya, terutama bagi para dosen dengan beragam latar belakang kompetensi yang dimiliki.

Setidaknya, ada dua parameter untuk menilai kualitas dosen. *Pertama*, produktivitas karya-karya ilmiah yang dihasilkan sesuai dengan latar belakang kompetensi keilmuan yang dipunyai. *Kedua*, apakah karya-karya tersebut mampu memberi pencerahan kepa-

da publik --khususnya kepada para mahasiswa--, yang memuat ide energik, konsep cemerlang atau teori baru. Maka kehadiran buku ilmiah dalam segala jenisnya bagi dosen merupakan sebuah keniscayaan.

Buku yang ditulis Saudara Ahidul Asror ini mencoba memaparkan tentang langkah yang ditempuh Kiai NU ketika berpartisipasi politik dalam pemilihan pemerintah daerah. Meski kasus studi ini dilakukan pada partisipasi politik pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2008, substansi kajian ini masih memiliki relevansi dengan partisipasi politik kiai dalam pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2013. Bahkan tidak itu saja, termasuk juga pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan bupati, walikota dan lain-lain.

Menurut penulis buku ini, hampir menjelang satu abad lamanya, sejarah perjuangan para kiai dan tokoh-tokoh NU lainnya turut mewarnai arah perjuangan bangsa. Dari sebelum Indonesia merdeka hingga era pasca reformasi, mereka tetap eksis memperjuangkan tegaknya nilai-nilai demokrasi. Boleh dikatakan bahwa tidak satu pun para pengamat yang menyangsikan peran mereka dalam mengisi hari-hari penting bangsa Indonesia dalam mencari makna dan jati dirinya. Sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang sosial-keagamaan, NU memang pernah terlibat dalam pengumpulan politik.

Namun, sejak menyatakan diri kembali kepada garis perjuangannya, NU tidak melarang lagi hak-hak warganya untuk terlibat dalam aktivitas politik. Fenomena mutakhir tentang partisipasi politik tokoh-tokoh NU yang sekarang menjadi perbincangan publik adalah keterlibatannya dalam pemilihan gubernur Jawa Timur. Hal ini terutama terjadi pada basis massa NU di wilayah tapal kuda, seperti Jember yang oleh sebagian pengamat disebut

menjadi barometer dalam melihat partisipasi politik mereka pada proses pemilihan gubernur Jawa Timur. Karena itu, studi yang dilakukan oleh penulis selalu aktual, apalagi studi ini lebih dikhususkan melihat partisipasi politik kiai NU Jember karena alasan basis massa NU yang sebagian besar ada di pedesaan masih kental dengan budaya patrimonial, di mana keputusan ada di tangan elit, seperti kiai. Alasan lain adalah bahwa meski warga NU Jember mengalami perubahan karena arus informasi dan pembangunan, tetapi kalangan kiai paling menentukan dalam mengambil keputusan.

Tentu saja, dan diharapkan karya ini akan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan dunia akademik bersamaan dengan program GELARKU (Gerakan Lima Ratus Buku) yang dicanangkan STAIN Jember dalam lima tahun ke depan. Program GELARKU ini diorientasikan untuk meningkatkan iklim akademis di tengah-tengah tantangan besar tuntutan publik yang menginginkan “referensi intelektual” dalam menyikapi beragam problematika kehidupan masyarakat di masa-masa mendatang.

Untuk itu, dalam kesempatan ini, saya mengajak kepada seluruh warga kampus untuk memanfaatkan GELARKU ini sebagai pintu kreatifitas yang tiada henti dalam mengalirkan gagasan, pemikiran, dan ide-ide segar dan mencerdaskan untuk ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan peradaban bangsa.

Kepada STAIN Jember Press, program GELARKU tahun pertama ini juga menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan prima kepada karya-karya tersebut agar dapat terwujud dengan tampilan buku yang menarik, *layout* yang cantik, perwajahan yang elegan, dan mampu bersaing dengan buku-buku yang beredar di pasaran. Melalui karya-karya para dosen ini pula, STAIN Jember Press memiliki kesempatan untuk mengajak ma-

syarakat luas menjadikan karya tersebut sebagai salah satu refensi penting dalam kehidupan akademik pembacanya.

Akhir kata, inilah karya yang bisa disodorkan kepada masyarakat luas yang membaca buku ini sebagai bahan referensi, di samping literatur lain yang bersaing secara kompetitif dan alam yang semakin menggloabal ini. Selamat berkarya.

Jember, Agustus 2013
Ketua STAIN Jember

Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS • iii

PENGANTAR KETUA STAIN JEMBER • v

DAFTAR ISI • ix

BAB 1

PENDAHULUAN • 1

- A. Latar Belakang • 1
- B. Tujuan dan Nilai Guna Studi • 8
- C. Memposisikan Studi Terdahulu • 9
- D. Memahami Metode Studi • 16

BAB 2

REFORMASI DAN PERGULATAN POLITIK KIAI Ñ 27

- A. Perubahan Sosial • 27
- B. Transisi Demokrasi • 33
- C. Partisipasi Politik • 44

BAB 3

DINAMIKA PARTISIPASI POLITIK KIAI Ñ 49

- A. Kiai: Peran dan Kategori • 49
- B. Kiai Dalam Dinamika Politik Bangsa • 57

BAB 4

PILKADA: RUANG PARTISIPASI POLITIK KIAI NU Ñ 67

- A. Partisipasi Kiai NU dalam Pilkada • 67
- B. Posisi Kiai NU dalam Pilkada • 92

BAB 5

CATATAN PENUTUP Ñ 101

- A. Kesimpulan • 101
- B. Rekomendasi • 102

DAFTAR PUSTAKA Ñ 105

TENTANG PENULIS Ñ 111

BAB 1



PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu kecenderungan era pasca reformasi adalah semakin menguatnya bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam ranah kehidupan berbangsa. Praktis pada semua segmen kehidupan berbangsa mengalami apa yang disebut oleh beberapa orang pakar sebagai euforia bangsa Indonesia. Keinginan warga negara untuk membentuk pemerintahan yang lebih demokratis merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi setelah sekian lama mereka hidup di bawah bayang-bayang pemerintah otoriter. Keinginan tersebut terutama tidak dapat dipisahkan dengan ke-

pentingan-kepentingan politik umat Islam yang nota bene sebagai warga negara mayoritas. Dengan tidak memandang remeh keberadaan umat lain, umat Islam boleh dibilang menjadi salah-satu dari sekian banyak variabel yang berpengaruh dalam menentukan berbagai kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia sejak Orde Lama hingga sekarang.

Fakta tentang keberadaan Islam yang demikian berpengaruh tersebut bukanlah sama sekali tidak membawa konsekuensi-konsekuensi. Salah satu konsekuensi itu adalah munculnya masalah mendasar tentang bagaimana hubungan Islam dan demokrasi atau tentang bagaimana partisipasi masyarakat Islam dalam demokrasi. Masalah ini mendapat artikulasi secara luas dari publik terutama kalangan akademisi. Sebagaimana hal itu juga pernah disinggung oleh Verba, Schlozman, dan Brady yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan jantungnya demokrasi. Menurut mereka, demokrasi mensyaratkan warga berpartisipasi secara bebas dalam pemerintahan.¹

Dalam salah satu studi tentang hubungan Islam dan demokrasi, memang ditemukan pandangan beberapa orang pakar yang menyangsikan kemampuan umat Islam untuk dapat berpartisipasi politik dalam sebuah sistem demokrasi modern—seperti di Indonesia dewasa ini—karena alasan bahwa sistem tersebut tidak dikenal dalam tradisi politik Islam. Pendapat itu antara lain dikemukakan oleh Samuel Huntington yang menyatakan bahwa kegagalan demokrasi di negara-negara Muslim antara lain disebabkan oleh karena watak budaya dan masyarakat Islam yang

¹Lihat dalam Saiful Muzani, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Paska-Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Utama, 2007), 25

tidak ramah terhadap konsep-konsep liberalisme model Barat.² Huntington bahkan lebih jauh mengatakan bahwa partisipasi politik umat Islam dalam sistem demokrasi modern tidak mungkin menjadi kenyataan karena loyalitas Muslim yang demikian kuat mempertahankan konsep *ummah* (komunitas kaum Muslim), yang di dalamnya mengandung ajaran bahwa kesetiaan kepada negara merupakan bagian dari kesetiaan kepada agama. Ini berbeda dengan konsep *nation-state* (negara-bangsa) sebagai unsur utama demokrasi modern. Sintesis antara sentimen Islam dengan ide negara-bangsa bagi Huntington tidak mungkin terjadi karena ada pertentangan antar keduanya.

Tesis Huntington itu mungkin berlaku bagi sebagian besar negara berpenduduk mayoritas Muslim di Timur-Tengah. Namun, tidak demikian dengan apa yang terjadi di Indonesia. Dalam sejarah politik Indonesia modern, partisipasi politik Islam sungguh-sungguh merupakan faktor yang penting dalam sejarah bangsa yang tidak dapat begitu saja dikesampingkan. Fenomena keterlibatan masyarakat Muslim dalam kancah politik Nasional dari masa Orde Lama hingga masa sekarang adalah bukti bahwa Muslim Indonesia mempunyai peranan besar dalam partisipasi politik dan menentukan arah perjuangan bangsa. Contoh riil adalah berdirinya partai-partai politik Islam, baik yang berhaluan Nasionalis-Religius ataupun Islamis, masa Orde Lama hingga sekarang.

Selain keterlibatan partai-partai politik tersebut, partisipasi politik warga sipil, seperti masyarakat Muslim Indonesia dalam dinamika negara-bangsa dengan tujuan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi juga dipresentasikan oleh para aktor dalam

²Samuel Huntington, *The Clash of Civilization. Remaking of The World Order* (New York: Simon and Schuster, 1997), 112.

organisasi besar Islam yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan seperti NU dan Muhammadiyah, dua organisasi Islam dengan basis massa sangat kuat. NU misalnya, sejak Orde Lama hingga masa pasca reformasi tetap eksis mendukung terciptanya masyarakat sipil (*civil society*) demi tegaknya nilai-nilai demokrasi.³ Tokoh-tokoh NU seperti KH. Adurrahman Wahid (Gus Dur) bahkan pernah membidani lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hasil pemilu pada tahun 1999 bahkan sekaligus mengantarkan Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia ke-4. Sekarang, meski NU tidak terlibat lagi di dalam pergulatan politik praktis, tetapi NU tidak melarang hak politik bagi warganya untuk berkecimpung dalam kegiatan politik.⁴

Fenomena tentang partisipasi politik warga NU itulah yang sekarang menjadi wacana publik, terutama warga masyarakat Jawa Timur dengan basis massa sebagian besar berpusat di wilayah tapal kuda, seperti Pasuruan, Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi. Warga NU di wilayah ini disebut-sebut sebagian pengamat menjadi barometer untuk melihat sejauh mana partisipasi politik mereka dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur tahun 2008. Para pengamat tentu mempunyai alasan mengingat tokoh-tokoh NU sepeninggal Rois Akbar, KH. Hasyim Asy'ari, menjadi tokoh besar di wilayah ini,

³Lihat Douglas E Ramage, "Demokratisasi, Toleransi Agama dan Pancasila: Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid," dalam *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara* (Yogyakarta: LKiS, 1997), 194-219.

⁴NU secara institusi pernah terlibat intens dalam kegiatan politik praktis. Lihat masalah ini dalam karya Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967* (Yogyakarta: LKiS, 1998). Baca pula Faisal Ismail, *Dilema NU di Tengah Pragmatisme Politik* (Jakarta: Balitbang Agama Depag RI, 2004).

sebut saja misalnya KH. Ahmad Siddiq, KH. Yusuf Muhammad, serta sesepuh sekaligus tokoh nasional yang sekarang masih aktif berjuang di tengah-tengah masyarakat, KH. Muchit Muzadi (Mbah Muchit).

Ketiga tokoh yang saya sebutkan di atas sangat populer di Jember, di samping masih ada pula tokoh-tokoh lain. Itulah salah satu alasan atau daya tarik mengapa studi ini diusulkan oleh penulis, di samping untuk menjelaskan partisipasi politik masyarakat NU Jember yang dahulu dikenal sebagai masyarakat berbudaya patrimonial—budaya yang menempatkan elit masyarakat, seperti kiai sebagai figur yang paling menentukan dalam mengambil keputusan-keputusan. Selain itu, ada alasan lain yang cukup paradoks dengan kondisi masyarakat Jember masa-masa sebelumnya, yaitu keadaan masyarakat yang sekarang sedang mengalami gejala perubahan sosial yang diakibatkan oleh semakin terbukanya arus informasi serta proses pembangunan yang meliputi berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, politik, sosial, dan budaya.

Terbukanya akses informasi dan proses pembangunan bagi masyarakat Jember membawa banyak konsekuensi, salah satunya adalah terciptanya masyarakat transisi yang oleh Fred W Riggs disebut dengan istilah model masyarakat prismatic.⁵ Pengaruh pembangunan ini pula yang menjadikan mayoritas warga NU tidak bisa lagi dikategorikan sebagai warga masyarakat pedalaman-tradisional dan tidak dapat pula disebut masyarakat modern. Mereka ada di antara keduanya, dan tentu mereka tidak dapat meng-

⁵Lihat dalam M. Munandar Soelaiman, *Dinamika Masyarakat Transisi: Mencari Alternatif Teori Sosiologi dan Arah Perubahan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 37

hindari pengaruh perubahan sosial yang dipenuhi dengan dilema. Mereka dihadapkan kepada banyak pilihan, termasuk menentukan pilihan dalam proses Pilkada Jawa Timur tahun 2008. Namun, dari sekian banyak warga masyarakat NU yang secara cepat dapat menyaring berbagai informasi untuk mengambil berbagai keputusan adalah kalangan NU terpelajar seperti para kiai. Sebagaimana pada berbagai pemberitaan di media massa, tidak sedikit di antara mereka yang terlibat dalam partisipasi politik baik secara langsung ataupun tidak langsung pada proses Pilkada Jawa Timur 2008. Bahkan, sebagian di antara mereka terlibat jauh dengan melakukan ikrar mendukung kepada salah satu pasangan calon.⁶

Studi ini tidak menekankan pada pembahasan tentang terpecahnya pandangan kiai NU Jember dalam mendukung salah satu pasangan calon gubernur, yang masing-masing mengklaim diri sebagai representasi dari masyarakat NU, yaitu pasangan Kaji (Khofifah Indarparawansah-Mujiono) dan Karsa (Soekarwo-Saifullah Yusuf). Namun, difokuskan mengkaji kiprah salah satu kiai muda NU Jember, KH. Abdullah Syamsul Arifin (Gus Aab) dalam memberikan pencerahan politik kepada masyarakat.

Dalam berbagai kesempatan forum seminar, diskusi dengan penulis, dan ceramah-ceramah agama di tengah masyarakat umum, Gus Aab tidak pernah mempresentasikan diri secara formal sebagai pengurus NU yang mendukung salah satu pasangan calon gubernur, apalagi memakai atribut-atribut guna mendukung salah satu pasangan calon. Namun, pada sisi lain, ia dikenal sebagai salah satu kiai yang ikut merekomendasi Khofifah Indarpara-

⁶Tentang pemberitaan keterlibatan kiai dalam proses dukung mendukung salah satu pasangan calon gubernur dapat dibaca misalnya dalam Kompas Jawa Timur, tanggal 23 Oktober 2008.

wansah, calon gubernur yang ikut "bertarung" dalam memperebutkan jabatan sebagai orang nomor satu di Jawa Timur. Tentu saja hal itu dilandasi oleh berbagai alasan dan pertimbangan rasional Gus Aab sebagai salah seorang warga nahdhiyyin.

Gus Aab pernah bertutur bahwa secara institusi NU tidak pernah ikut campur dalam urusan dukung mendukung salah satu pasangan calon gubernur, tetapi dalam waktu yang sama, ia mengatakan bahwa orang-orang NU harus menjatuhkan pilihan-nya kepada salah satu pasangan calon. "NU dalam aturan jam'iyah-nya memang netral, tetapi orang NU harus memilih calon gubernur yang memiliki kriteria sebagai pemimpin yang secara kolektif (dalam pemerintahan) dianggap mampu merealisasikan amaliyah dan visi Ahlussunah wal Jama'ah (ASWAJA)", demikian dikatakan Gus Aab.

Posisi Gus Aab sebagai pengurus jam'iyah NU dan pandangan-pandangan serta gagasan politiknya sebagai warga NU tentang visi ASWAJA kiranya layak untuk dikaji secara akademis. Pandangan dan gagasannya tentang visi ASWAJA NU dalam medan politik tak pelak menghadirkan sebuah wacana tentang ijtihad politiknya dalam menerjemahkan makna khittah NU 1926. Makna yang dalam pengakuan Gus Aab tidak jarang dipakai sebagai senjata oleh sebagian orang (termasuk orang-orang di dalam NU sendiri) untuk memecah belah warga NU demi kepentingan politik praktis yang sesaat. Data-data tentang masalah-masalah inilah yang antara lain dideskripsikan dalam studi ini.

Berangkat dari deskripsi di atas, secara umum, masalah studi ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana cara partisipasi politik yang ditempuh oleh kiai NU Jember dalam proses pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2008?. Sedangkan secara khusus, masa-

lah studi ini menjawab tentang; 1) Apakah terjadi pergeseran peran kiai NU Jember ketika berpartisipasi politik dalam pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2008?; 2) Apakah terjadi penambahan fungsi kiai NU Jember ketika berpartisipasi politik dalam pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2008?; 3) Mengapa terjadi pergeseran-pergeseran peran dan penambahan fungsi kiai NU Jember ketika berpartisipasi politik dalam proses pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2008?

B. TUJUAN DAN NILAI GUNA STUDI

Tujuan umum studi ini adalah memahami bentuk partisipasi politik yang dilakukan kiai NU Jember dalam proses pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2008. Adapun secara khusus, tujuan yang ingin diraih dari studi ini adalah untuk: 1) Menjelaskan terjadinya pergeseran peran kiai NU Jember ketika berpartisipasi politik dalam pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2008; 2) Menjelaskan terjadinya penambahan fungsi kiai NU Jember ketika berpartisipasi politik dalam pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2008; dan 3) Menjelaskan terjadi pergeseran-pergeseran peran dan penambahan fungsi kiai NU Jember ketika berpartisipasi politik dalam proses pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2008.

Sedangkan manfaat yang bisa diraih dari hasil studi ini adalah: 1) Menyumbang teori tentang perubahan-perubahan perilaku politik kiai ketika berpartisipasi dalam kegiatan politik, 2) Mengkritik teori yang berasumsi tentang mandegnya fungsi kepemimpinan dan peran kiai dalam merespon perubahan sosial, dan 3) Melacak kemungkinan lahirnya tipologi baru tentang kiai yang didasarkan atas perannya dalam masyarakat yang berubah.

C. MEMPOSISIKAN STUDI TERDAHULU

Sebuah karya studi yang secara umum membahas keterlibatan masyarakat Islam dalam partisipasi politik di Indonesia pasca runtuhnya pemerintahan Orde Baru antara lain pernah dilakukan oleh Saiful Mujani. Hasil studi penulis yang aktif di Lembaga Survei Indonesia (LSI) itu telah diterbitkan dalam bentuk buku berjudul "Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru". Buku setebal kurang-lebih 350 halaman itu memperkuat tesis-tesis sebelumnya yang membahas tentang adanya berbagai unsur dalam Islam dan dimensi partisipasi politik berhubungan satu sama lain. Tidak ada satu pun unsur-unsur yang terdapat di dalam Islam yang berkorelasi negatif dan signifikan dengan dimensi manapun dari partisipasi politik. Hampir semua unsur Islam berkorelasi positif dan signifikan dengan semua dimensi partisipasi politik. Mujani dalam buku ini bahkan secara lebih spesifik menyebutkan bahwa identitas ke-NU-an....berkorelasi positif dan signifikan dengan aktivitas kampanye dan kerja kemasyarakatan.⁷

Temuan tersebut menurut Mujani membantah apa yang pernah dikatakan oleh Huntington bahwa partisipasi politik terkait erat dengan obyek-obyek Islam. Muslim Indonesia menurut Mujani dalam karya studi ini dikatakan berpartisipasi dalam kegiatan politik dengan tanpa melihat obyek partisipasi, Islami atau tidak. Mereka menghadiri pertemuan masyarakat setempat, mengorganisasikan masyarakat untuk memecahkan masalah bersama, bekerja sama, menghubungi pejabat publik, menghadiri rapat umum dalam musim kampanye, berpartisipasi dalam pawai politik, membantu partai, mengorganisasikan dan menandatangani

⁷Periksa Saiful Mujani, *Muslim Demokrat*, 270-271

ni petisi untuk masalah publik. Bahkan, berpartisipasi dalam demonstrasi dan aksi politik langsung dalam bentuk lain. Seluruh aktivitas itu terkait secara positif dengan apa yang di dalam Islam.⁸

Studi lain yang secara khusus membahas tentang partisipasi politik masyarakat Islam yang direpresentasikan kiai (kalangan elit NU) pernah dilakukan oleh Ali Maschan Musa. Disertasi Ali yang diselesaikan di Universitas Airlangga Surabaya ini telah diterbitkan dengan judul "Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama". Karya ini secara umum mengkaji tentang keterlibatan Islam—melalui agen-agensya—sebagai agama yang mampu menjadi faktor penting di dalam proses membentuk negara-bangsa (baca; nasionalisme), di mana hal itu sangat tergantung kepada paradigma yang digunakan dalam memahami ajaran-ajaran agama. Paradigma yang dimaksud adalah paradigma yang digunakan para kiai NU yang dikenal dengan istilah paradigma inklusif, kontekstual dan lebih mementingkan substansi daripada formalnya. Model tersebut menurut Ali mampu mewujudkan visi sosial dan politik bersama di dalam masyarakat Indonesia yang dikenal sangat pluralis. Kenyataan demikian menurut Ali menempatkan posisi Islam sebagai faktor *genuin* yang mendorong munculnya rasa kebangsaan dalam individu di masyarakat.⁹

Sebagaimana Mujani yang mengatakan tentang adanya korelasi positif dan signifikan antara Islam dengan dimensi pada partisipasi politik, dalam buku ini, Ali menfokuskan studinya pada pemahaman para kiai tentang ajaran Islam yang tidak hanya

⁸ Ibid.

⁹ Lihat kata pengantar yang disampaikan dalam karya Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2007), xiii.

berhubungan dengan ajaran moral, tetapi juga mengajarkan kepada masalah-masalah rinci tentang bagaimana umat manusia harus bertindak, baik dalam konteks hubungan dengan Tuhan maupun dengan sesama, termasuk di dalamnya tata cara mengatur negara.¹⁰ Temuan yang perlu digarisbawahi dalam buku yang ditulis oleh Ali ini adalah adanya varian-varian dari pandangan para kiai tentang nasionalisme hingga ditemukan sebuah pembahasan tentang tipologi kiai dalam mengkonstruksi nasionalisme.¹¹

Keterlibatan kiai dalam kegiatan politik juga pernah diteliti oleh Imam Suprayogo dalam buku berjudul, "Kiai dan Politik: Membaca Citra Politik Kiai". Buku setebal kurang-lebih 330 halaman ini melihat keterlibatan kiai dalam berbagai kegiatan masyarakat secara umum, salah satunya adalah keterlibatan dalam aspek politik pada pedesaan Jawa-Madura di Kecamatan Tebon Kabupaten Malang. Imam menyebutkan bahwa di dalam partisipasi politik, kiai menempuh cara yang berbeda. Afiliasi politik misalnya dilakukan oleh kiai dengan cara menyokong partai yang mendapat dukungan pemerintah. Tindakan ini dilakukan karena keinginan kiai mendapatkan fasilitas pemerintah untuk mengembangkan dakwahnya.¹² Dalam buku hasil studi ini, Imam memaparkan adanya kiai independen, yaitu kiai yang tidak tergantung pada kemauan pihak lain, kemauan pemerintah. Model kiai ini secara terang-terangan melakukan gerakan massa dalam mendukung partai yang berseberangan dengan partai yang didukung

¹⁰Ibid., 235-236

¹¹Lihat nasionalisme menurut kiai fundamentalisme, moderat, dan pragmatis. Ibid., 278-299

¹²Lihat proposisi yang dikemukakan dalam buku Imam Suprayogo, *Kiai dan Politik: Membaca Citra Politik Kiai* (Malang: UIN Press, 2007), 287.

pemerintah. Bentuk keterlibatan tersebut disebut Imam dengan istilah partisipasi aktif kritis. Pada bagian akhir tulisannya, Imam mengajukan proposisi, yaitu: jika kiai masih dipersepsi sebagai penyandang simbol kesucian agama, maka ia tetap memiliki kharisma dan jika terjadi perubahan sosial yang menimbulkan persepsi, maka hubungan kiai dan umat berubah.¹³

Studi lain juga dilakukan oleh Pradjarta Dirdjosanjoto dalam bukunya "Memelihara Umat: Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa". Karya yang diterbitkan dalam bentuk buku ini secara khusus tidak membahas tentang keterlibatan kiai dalam kegiatan politik. Namun, peran sentral kiai di bidang keagamaan tidak dapat dilepaskan dari peran mereka di bidang politik. Berpusat pada perannya sebagai guru dan ahli agama, para kiai seringkali memainkan peran penting di berbagai bidang, termasuk bidang politik. Pandangan bahwa Islam tidak memisahkan antara agama dan negara ikut mendorong munculnya gejala-gejala politik yang dibahas dalam karya Dirdjosanjoto ini. Studi ini sebenarnya lebih menonjolkan peran kiai langgar yang dalam banyak studi tentang pesantren sebelumnya kurang mendapatkan porsinya. Kiai langgar yang tunduk kepada kiai pesantren, pada kenyataannya paling berperan dan memiliki hubungan langsung dengan umat. Dalam bab-bab khusus, Dirdjosanjoto menulis tentang "Kiai dan Medan Politik" juga tentang "Medan-medan Politik Lokal yang Sedang Berubah: Hubungan Agama dan Politik".¹⁴

Salah satu hal penting yang dijelaskan Dirdjosandjoto dalam studi ini adalah terjadinya pergeseran medan politik pemimpin

¹³Ibid., 290

¹⁴Lihat dalam Pradjarta Dirdjosanjoto, *Memelihara Umat: Kiai Pesantren – Kiai Langgar di Jawa* (Yogyakarta: LKiS, 1999), 187-213.

agama akibat program modernisasi desa oleh pemerintah, menyangkut modernisasi pemerintahan desa. Modernisasi ini dalam praktiknya menyangkut berbagai kebijakan tentang perubahan struktur birokrasi dan administrasi. Perubahan struktur birokrasi desa ini turut menjadi faktor perubahan dimensi struktural para pemimpin agama (kiai), dari yang semula berposisi sebagai modin berubah menjadi kaur kesra. Perubahan-perubahan ini tentu juga diikuti dengan perubahan pada uraian tugas yang cukup rinci, yang dimaksudkan sebagai upaya pemerintah mengeluarkan persoalan keagamaan dari medan politik lokal. Secara teoritis, perubahan ini memperlihatkan beberapa perubahan yang mendasar, di mana pada masa sebelumnya tugas modin hanya mengurus masalah keagamaan, seperti membantu mereka yang akan melaksanakan akad nikah, talak dan rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA), mengatur upacara kematian (memandikan jenazah, upacara penguburan, dan sebagainya), memimpin pembacaan do'a pada berbagai upacara keagamaan yang diselenggarakan penduduk.¹⁵

Studi tentang keterlibatan para kiai pesantren yang mempunyai latar belakang NU dalam aktivitas politik pasca runtuhnya Orde Baru juga pernah dilakukan di Yogyakarta oleh Khoiro Ummatin dalam bukunya, "Perilaku Politik Kiai".¹⁶ Karya ini menfokuskan bahasan pada persoalan tentang perilaku kiai pesantren dalam kaitannya dengan perubahan peran sosial politik organisasi NU pasca reformasi. Langkah politik NU secara organisasi dan kiai pesantren pada pemilu 1999 menurut penulis buku ini merupakan

¹⁵Ibid., 184

¹⁶Khoiro Ummatin, *Perilaku Politik Kiai* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

fenomena baru sejak NU kembali kepada khittah 1926. Keterlibatan institusi NU dan sejumlah kiai NU dalam deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membuktikan bahwa kelompok kepentingan ini menaruh kepedulian terhadap nasib demokrasi di Indonesia, meskipun kebijakan itu bertabrakan dengan keputusan muktamar Situbondo. Tampilnya kiai-kiai NU dalam pendeklarasian PKB menjadi indikasi terjadinya perubahan peran sosial politik mereka dalam merespon perubahan sosial politik hingga pada dataran praksis.

Penulis buku ini juga menjelaskan bahwa langkah yang ditempuh kiai-kiai NU mendeklarasikan PKB dinilai sangat strategis jika dibandingkan dengan situasi politik NU pada tahun 1955, saat di mana organisasi NU masih berposisi sebagai partai politik. Kondisi ini juga sangat berbeda jauh dengan kontribusi politik NU pada masa-masa Orde Baru berkuasa yang lebih memposisikan NU sebagai organisasi yang tidak mempunyai kekuatan pemaksa terhadap partai politik yang menjadi afiliasinya. Namun, di balik perbedaan-perbedaan tersebut muncul pula adanya persamaan-persamaan antara iklim politik NU masa lalu dengan iklim politik NU masa reformasi, yaitu sama-sama kuatnya dua institusi sosial (tradisi pesantren dan organisasi NU). Kuatnya dua institusi NU ini memunculkan keseragaman perilaku politik sebagian besar kiai pesantren di Yogyakarta dalam memilih PKB pada pemilu tahun 1999.¹⁷

Melengkapi studi-studi di atas, ada satu karya penting yang membahas keterlibatan kiai dalam masyarakat dan yang melahirkan tesis penting tentang peran kiai sebagai agen perubahan (*agent of change*). Studi ini dilakukan Hiroko Horikoshi di Cipari,

¹⁷Ibid., 103.

Jawa Barat dan diterbitkan dalam bentuk buku berjudul "Kyai dan Perubahan Sosial".¹⁸ Karya ini memperbaiki teori Clifford Geertz tentang peranan kiai sebagai "makelar budaya" (*cultural broker*).¹⁹ Menurut Geertz, kiai mempunyai peran sebagai alat penyaring atas arus informasi yang masuk ke dalam lingkungan santri, menularkan apa yang dianggap berguna dan membuang apa yang dianggap merusak bagi mereka. Namun, menurut Geertz, peranan kiai sebagai penyaring ini akan macet, ketika arus informasi yang masuk begitu deras dan tidak mungkin lagi dapat disaring oleh kiai. Dalam keadaan yang demikian ini, kiai akan kehilangan peran dalam proses perubahan sosial yang terjadi. Akibat perannya yang semakin sekunder tersebut, maka kiai akan mengalami apa yang disebut dengan istilah kesenjangan budaya (*cultural lag*) di masyarakat. Teori Geertz inilah yang diruntuhkan Horikoshi.

Horikoshi dalam karya ini mengatakan tentang adanya perubahan fungsi dan peran kiai. Dari semula kiai hanya bertugas meneruskan instruksi-instruksi dari luar kepada masyarakat dan sesekali menjadi wakil orang luar memobilisasi masyarakat yang dipimpinnya, tetapi dalam studinya Horikoshi melihat adanya kecenderungan yang berubah ketika rezim militer pemerintah mulai meningkatkan kekuasaannya di masyarakat pedesaan. Kiai telah menampakkan keengganannya untuk berkomitmen dengan partai manapun. Kiai juga dengan hati-hati menjauhi keterlibatannya dalam organisasi-organisasi semi pemerintah, seperti

¹⁸Periksa karya studi yang dihasilkan oleh peneliti berkebangsaan Jepang, Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1987).

¹⁹Lihat dalam Clifford Geertz, *The Javanese Kijaji: the Changing Roles of a Cultural Broker. Comparative Studies in Society and History* (tt: tp, 1960), 2.

MUI dan Golkar. Menariknya, kyai masih menerima sumbangan dari pemerintah untuk memperbaiki sarana-sarana umum dan perbaikan madrasah. Kiai tidak mengakui dengan tulus rezim yang berkuasa, tetapi masih memandang perlu Repelita, khususnya bidang pembinaan mental. Posisi kiai yang begitu tinggi ini tidak tergoyahkan di hadapan pejabat pemerintah.²⁰ Fakta-fakta tersebut menurut Horikoshi menunjukkan fungsi kiai berperan aktif dalam perubahan sosial. Bukan karena kiai mencoba meredam perubahan-perubahan, tetapi ia justru memelopori perubahan sosial dengan caranya sendiri. Dalam posisi ini, kiai tidak hanya menyaring informasi sebagaimana dikatakan oleh Geertz, melainkan menawarkan agenda perubahan yang dianggap sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat yang dipimpinnya.²¹

D. MEMAHAMI METODE STUDI

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan penyusunan teori dari cara berfikir induktif-empiris.²² Model berfikir induktif-empiris dimulai dengan mendeskripsikan tentang berbagai fenomena yang terjadi di lapangan studi. Alasan mengapa studi kualitatif digunakan di dalam kajian ini adalah karena yang akan dikaji adalah makna dari apa yang ada di balik tindakan

²⁰Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*, 234

²¹Lihat pengantar Abdurrahman Wahid, "Benarkah Kyai Membawa Perubahan Sosial?: Sebuah Pengantar." dalam Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1987), xvii.

²²Dede Oetomo, "Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial," dalam Makalah Seminar yang diselenggarakan oleh Balai Kajian Sumber Daya Manusia. Surabaya, FISIP Unair. Oktober 1993.

individu;²³ studi kualitatif memberi peluang bagi kajian mendalam tentang kesadaran dan tindakan yang dilakukan individu dalam masyarakat;²⁴ studi kualitatif memberikan peluang untuk mengkaji fenomena simbolik secara holistik.²⁵ Artinya, fenomena yang dikaji merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan karena tindakan yang terjadi di masyarakat bukanlah diakibatkan oleh satu faktor, melainkan melibatkan sekian banyak faktor. Dengan alasan-alasan tersebut, maka posisi penulis adalah orang yang sedang belajar dari apa yang menjadi pandangan subyek (*learning from the people*).²⁶

Oleh karena studi ini memusatkan perhatian kepada hal-hal yang bersifat unik (*casual*) yang terjadi secara alamiyah (dalam arti tidak ada campur tangan penulis), maka studi kasus digunakan dalam studi ini.²⁷ Studi kasus lebih dikhususkan untuk memberi penekanan kepada persoalan tentang bagaimana keterlibatan kiai dalam berpartisipasi politik, yaitu ketika mereka berhadapan dengan proses-proses pada pemilihan gubernur Jawa Timur yang

²³Baca pokok persoalan Sosiologi yang dikemukakan oleh Max Weber tentang konsep "tindakan sosial" dalam George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: Rajawali Press, 1995), 44.

²⁴Lihat Clifford Geertz, "Agama sebagai Sistem Budaya," dalam Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion*. ter. Ali Noer Zaman (Yogyakarta: Qalam, 1996), 395-397. Lihat juga Geertz, *Kebudayaan dan Agama*, ter. Fransisco Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 1-4.

²⁵Lihat Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi* (Malang: YA3, 1990), 8.

²⁶*Ibid.*

²⁷Bandingkan dengan model penelitian Etnografi yang bertujuan mempelajari peristiwa kultural yang menyajikan pandangan hidup subyek yang diteliti di lapangan. Periksa Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 129.

berlangsung hingga dua kali putaran. Studi kasus merupakan upaya mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menganalisis partisipasi politik KH. Abdullah Syamsul Arifin dengan tetap berpegang teguh kepada prinsip holistik.²⁸ Kata Miller, studi kasus tidak lain adalah *indepth analyses of single or few communities* (analisa mendalam tentang satu atau beberapa komunitas).²⁹

Selama melakukan pengamatan terhadap kiai-kiai di Jember menjelang PILKADA Jawa Timur, ditemukan partisipasi politik yang berbeda antara satu kiai dengan kiai yang lain. Seperti diberitakan dalam berbagai media, kiai-kiai itu secara umum terbelah menjadi dua kutub dukungan yang sama-sama mengklaim diri membela kepentingan orang NU. Dua kutub dukungan itu lebih-lebih semakin menampakkan diri menjelang berlangsungnya putaran II tanggal 4 November 2008. Kelompok pertama dikategorikan oleh media sebagai kelompok kiai kultural pendukung pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) yang pada putaran II diusung oleh partai-partai besar, selain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pimpinan Megawati, yaitu: Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera. Kelompok kedua dikategorikan oleh media sebagai kelompok kiai struktural pendukung pasangan Khofifah Indarparawansah-Mujiono (Kaji) yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan, Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan partai-partai kecil yang sejak awal mendukung pasangan Kaji pada pemilihan putaran I tanggal 23 Juli

²⁸Michael Quinn Patton, *Qualitative Research & Evaluation Method* (London: Sage Publications, 2002), 447

²⁹Gale Miller, "Case Studies", dalam David Lavinson dan Malvin Ember (ed), *Encyclopedia of Cultural Anthropology*, Vol.4 (New York: Henry Holt and Company, 1996), 167.

2008.

Banyaknya kiai NU dengan afiliasi politik yang beragam itu, membikin studi ini tidak bisa tidak harus menentukan subyek studinya, yaitu memilih salah seorang figur kiai NU Jember yang dianggap cukup signifikan kiprahnya dalam proses pemilihan gubernur Jawa Timur, dari pemilihan putaran I hingga putaran II. Pilihan itu jatuh kepada sosok kiai muda bernama, KH. Abdullah Samsul Arifin (biasa dipanggil Gus Aab). Pemilihan nama ini tentu didasari oleh berbagai alasan yang sangat kuat. (1) Gus Aab penulis kenal sebagai salah seorang kiai NU Jember yang menjadi penasehat Tim Sembilan, sebuah tim yang dibentuk oleh ulama NU Jawa Timur untuk melakukan pengkajian terhadap siapa calon gubernur yang layak memimpin Jawa Timur, (2) Gus Aab penulis kenal sebagai salah seorang kiai NU Jember yang berstatus sebagai salah seorang pengurus wilayah NU Jawa Timur, sebuah posisi yang tidak gampang dimainkan di tengah kenetralan posisi NU sebagai organisasi sosial-keagamaan, dan (3) Gus Aab penulis kenal sebagai figur kiai NU Jember yang piyawai menyampaikan gagasan di tengah variatifnya opsi masyarakat NU Jember.

Sumber-sumber data yang digunakan dalam studi ini terdiri atas sumber data primer dan data skunder. Data primer bersumber atau diperoleh dengan teknik wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap tindakan dan kata-kata yang diungkapkan Gus Aab ketika terlibat dalam partisipasi politik pada Pilkada gubernur Jawa Timur 2008, dari putaran I hingga putaran II.

Sumber data skunder diperoleh penulis melalui teknik dokumenter, yaitu berupa catatan-catatan buku harian, media massa seperti koran terbitan nasional dan lokal. Selain itu, data skunder

juga diperoleh melalui dokumen resmi berbagai lembaga yang secara intens terlibat dalam proses pemilihan gubernur Jawa Timur, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Di samping itu, juga ada sebagian data yang diperoleh dari para relawan yang tergabung pada masing-masing tim sukses pasangan calon, juga dari lembaga-lembaga non-resmi, seperti lembaga survey.

Kegiatan studi yang akhirnya berhasil menyajikan laporan studi ini dilakukan oleh penulis melalui beberapa tahapan. *Pertama*, menyiapkan kerja studi. Awal tahun 2008, Pusat Studi dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) STAIN Jember menawarkan proyek studi yang terbagi dalam dua kategori: jenis riset kompetitif pengembangan dan unggulan. Sesuai dengan aturan yang ditetapkan P3M, penulis wajib mengambil jenis riset yang kedua. Ada sekitar tujuh tema studi yang ditawarkan kepada setiap penulis. Masing-masing tema itu adalah sebagaimana berikut: (1) Inovasi dan Pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman, (2) Reformasi dan Pengembangan Pendidikan Islam, (3) Islam, Pluralisme, dan Multikulturalisme, (4) Dakwah dalam Menghadapi Persoalan Kemiskinan, Ketidakberdayaan, dan Kekerasan Sosial, (5) Dinamika Pemikiran dan Gerakan Keagamaan Kontemporer, (6) Islam, Kemiskinan, dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, dan (7) Hukum Islam, Politik, dan Problematika Kemaslahatan Umat. Tema-tema tersebut dapat didekati dengan beragam pendekatan teori yang tersedia.

Atas dasar pertimbangan berbagai fenomena yang berkembang di masyarakat secara mutakhir, penulis mengambil tema politik dengan mencoba mengamati proses yang sedang berlangsung di tengah kehidupan masyarakat, yaitu momentum Pilkada

Jawa Timur tahun 2008 dengan fokus kepada keterlibatan kiai NU di dalam realitas politik. Hampir setiap hari, media massa seperti koran, televisi, dan media elektronik lainnya ramai memberitakan keterlibatan kiai NU dalam proses Pilkada Jawa Timur, hingga memunculkan istilah kiai kultural dan kiai struktural dalam mendukung salah satu pasangan calon gubernur. Setelah melihat beberapa literatur yang tersedia, penulis kemudian merumuskan konsep studi dengan judul: "Perubahan sosial masa transisi demokrasi: Studi Kasus Tentang Perubahan Sosial pada Dimensi Struktural Kiai NU Jember Ketika Berpartisipasi Politik Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur".

Tema dalam judul ini kami ajukan dalam bentuk proposal studi dengan sekian banyak argumentasi yang sudah penulis bangun sebelumnya. Argumentasi-argumentasi itu diperkuat dengan melakukan diskusi dengan beberapa orang kawan, baik dari kalangan akademisi dan kawan-kawan yang terlibat langsung sebagai relawan dari para calon gubernur Jawa Timur 2008 putaran I. Proposal studi itu akhirnya dapat penulis selesaikan sekitar awal bulan April 2008 setelah berkali-kali mendapat masukan dari beberapa kolega dan kawan sejawat penulis. Masuk-an itu antara lain diberikan Saudara Muhibbin, salah satu dosen STAIN Jember yang dalam kesempatan itu menjadi volunteer di sebuah lembaga bernama Pusat Studi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (PusDeHAM), terutama beberapa literatur yang dipinjam-kan kepada penulis.

Tanggal 7 April 2008, penulis mendaftarkan diri sebagai salah seorang peserta riset unggulan kepada sekretaris P3M STAIN Jember, saudara Abdul Rokhim. Beberapa hari, sambil menunggu dilaksanakan acara seminar proposal, penulis kembali memasti-

kan ketersediaan beberapa literatur pendukung. Antara lain, penulis datang ke beberapa toko buku dan sekaligus melakukan pengamatan awal terhadap beberapa orang kiai yang akan dijadikan sebagai subyek studi, sebelum akhirnya menentukan sosok KH. Abdullah Syamsul Arifin. Seminar proposal baru dilaksanakan pada pertengahan bulan April 2008 yang bertujuan untuk memastikan layak tidaknya studi ini mendapat biaya dari anggaran DIPA STAIN Jember tahun 2008. Seminar ini dihadiri Prof. Dr. H. Zainuddin Maliki, M.Si, reviewer yang memastikan bahwa studi ini layak diberi biaya, meski mendapat beberapa masukan darinya.

Kedua, menemukan data studi. Pada akhir bulan April 2008, sebelum pemilihan gubernur putaran I dilaksanakan pada 23 Juli 2008, penulis mulai melakukan tahap pekerjaan lapangan, yaitu tahap menemukan data di lapangan. Proses studi ini lebih banyak penulis habiskan untuk tahap pekerjaan ini, dengan mengamati dan sekaligus mencatat data dari lapangan studi. Berdiskusi dalam waktu yang cukup lama bersama KH. Abdullah Syamsul Arifin bukan merupakan kesulitan yang berarti karena lokasi tempat beliau tinggal mempunyai jarak yang tidak terlalu jauh dengan tempat tinggal penulis. Apalagi yang bersangkutan juga dikenal sebagai salah seorang dosen di STAIN Jember, tempat penulis bekerja. Kesulitan yang sering terjadi hanya disebabkan oleh kesibukan Kiai sebagai seorang da'i yang seringkali turun ke daerah-daerah, memberikan ceramah agama kepada masyarakat luas sehingga tinggal mengatur waktu bertemu dengannya. Namun, secara umum, atas kesahajaan diri Kiai, penulis dapat mengumpulkan berbagai data lewat wawancara dalam suasana santai.

Di tengah kesibukan penulis dalam proses menemukan data,

penulis dibantu oleh beberapa orang kawan yang dengan setia menemani penulis, kadang-kadang mereka turut serta membantu mencatat data di lapangan. Kawan-kawan itu antara lain Minan dan Suyitno (yang akrab penulis panggil Mbah Yit) yang sering berdiskusi dengan penulis tentang segala hal yang berkaitan dengan hasil observasi dan wawancara dengan KH. Abdullah Syamsul Arifin. Demikian pula dengan kawan lain seperti Abdul Haris, Kiai NU muda Jember ini seringkali penulis mintai penjelasan dan berdiskusi tentang kiprah KH. Abdullah Syamsul Arifin dalam keterlibatannya pada Pilkada Jawa Timur. Diskusi dengan kawan-kawan KH. Abdullah Syamsul Arifin, seperti Kiai Abdul Haris penulis lakukan untuk mengecek keabsahan data yang penulis peroleh.

Tahap menemukan data di lapangan ini berlangsung hingga putaran II pemilihan calon gubernur Jawa Timur 2008 berakhir. Penulis juga menggunakan beberapa orang informan yang bertugas mengatasi keterbatasan selama tidak terlibat di lapangan, termasuk orang-orang yang telah penulis sebutkan pada bagian awal. Dengan langkah seperti itu, maka penulis tidak lagi mendapatkan kesenjangan informasi antara tindakan-tindakan subyek yang diteliti dengan berbagai data yang diperoleh oleh penulis sendiri. Memberi kepercayaan dan memilih beberapa orang informan tersebut merupakan jalan yang ditempuh oleh penulis untuk “menggunakan orang dalam” ketika memahami berbagai tindakan yang dilakukan subyek yang diteliti dalam konteks sosial yang utuh. Intinya, informan seperti sesama kiai, dalam studi ini dianggap penulis memahami berbagai tindakan dan ungkapan yang muncul dari subyek yang diteliti. Informan sesama kiai dalam hal ini dianggap dapat memahami data-data studi dalam sektor yang

selama ini belum akrab bagi penulis.

Dari proses menemukan data studi lapangan (*field research*) ini diperoleh data primer dan data skunder. Data primer diperoleh penulis melalui wawancara dan observasi terhadap berbagai tindakan subyek, sedangkan untuk data skunder banyak diperoleh melalui dokumen yang dapat memperkuat atau memperjelas data primer. Wawancara yang seringkali digunakan penulis dalam menemukan data di lapangan adalah wawancara semi terstruktur dan wawancara tak terstruktur, di mana penulis mengajukan pertanyaan secara lebih leluasa, tanpa terikat oleh susunan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara tak terstruktur ini sangat membantu penulis karena banyak data penting yang sebelumnya berada di luar perkiraan penulis. Wawancara tak terstruktur ini dilakukan penulis di sela-sela kesibukan KH. Abdullah Syamsul Arifin sebagai penceramah dan pengajar di STAIN Jember.

Ketiga, menyajikan laporan studi. Pada dasarnya studi merupakan metode yang secara sistematis digunakan dalam rangka memperoleh pengetahuan ilmiah. Dalam studi ini, penulis juga berusaha untuk memperoleh pengertian tentang dunia yang dianggap masih samar.³⁰ Berbagai data tentang praktik ritual masyarakat lokal sebenarnya merupakan dunia nyata, tetapi masih samar dan memerlukan kajian secara mendalam agar diperoleh pengetahuan ilmiah tentangnya. Oleh karena itu, diperlukan bagaimana model menyajikan berbagai data primer dan skunder yang ditemukan dari lapangan ke dalam prosedur penulisan laporan studi yang lebih memadahi. Proses penulisan data yang ditemukan dari lapangan studi ini sudah mulai dilakukan sejak pertamakali penu-

³⁰Periksa Faisal, *Penelitian Kualitatif*, 88.

lis memperoleh data sampai data tersebut selesai dikumpulkan. Prosedur yang ditempuh penulis adalah melakukan reduksi data, menyajikan data dan mengambil kesimpulan.³¹ Reduksi data dilakukan sebatas pada data yang mempunyai kesesuaian dengan tujuan studi, penyajian data dilakukan secara narasi dan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan, tentu setelah semua data terkumpul.

Pada proses reduksi data, data yang sudah diperoleh penulis melalui teknik observasi terlibat maupun wawancara mendalam disusun dalam satuan-satuan sesuai dengan kategorisasi datanya. Kategorisasi ini disesuaikan dengan temanya masing-masing, misalnya data tentang alasan-alasan KH. Abdullah Syamsul Arifin ikut berpartisipasi dalam proses Pilkada Jawa Timur tahun 2008 dan lain sebagainya. Kategorisasi tersebut dimaksudkan untuk membangun keterjalinan antara konsep sehingga sesuai dengan tujuan studi. Hasil dari kategorisasi itu kemudian dideskripsikan oleh penulis sehingga berbentuk sebuah narasi, sebagaimana menjadi ciri dalam studi kualitatif.

Untuk menjaga keabsahan data, maka penarasian yang dilakukan penulis masih dalamungkapannya yang asli dari lapangan studi. Data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan subyek terus menerus penulis diskusikan dengannya dalam waktu yang berbeda. Kadang-kadang pula penulis melakukan ricek, mendiskusikannya kembali dengan beberapa orang-orang dekat subyek. Penulis berusaha dengan cara sungguh-sungguh, membuang kesan-kesan yang selama ini membelenggu diri penulis.³²

³¹Lihat prosedur ini dalam S. Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif-Naturalistik* (Jakarta: Tarsito, 1988), 128-130.

³²Periksa teknik pemeriksaan keabsahan data dalam Lexy J. Mo-

Seluruh kesan yang hinggap di dalam diri penulis telah dijauhkan, agar tidak ikut bercampur dengan data asli yang sudah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan. Data-data yang dinarasikan kemudian disimpulkan sebagai temuan studi. Selanjutnya, agar temuan tersebut dapat dipahami sebagai sesuatu yang orisinal, maka penulis melakukan upaya membandingkan atau mendiskusikannya dengan berbagai hasil studi yang dilakukan oleh para pakar sebelumnya.

[***]

leong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 175.

BAB 2



REFORMASI DAN PERGULATAN POLITIK KIAI

A. PERUBAHAN SOSIAL

Perubahan sosial merupakan salah satu pokok bahasan yang sangat penting. Bahkan ia telah menjadi salah satu cabang dari ilmu sosiologi dengan disokong oleh ilmu komunikasi, psikologi, ekonomi, antropologi, manajemen dan ilmu politik. Keterlibatan ilmu-ilmu tersebut diakibatkan oleh fakta bahwa perubahan sosial itu berkorelasi resiprokal (timbal balik) dengan ilmu-ilmu tersebut diatas.

Perubahan sosial dapat terjadi secara cepat ataupun lambat, tergantung kepada situasi lingkungan maupun faktor-faktor lain

yang saling berkaitan. Menurut Ravik Karsidi perubahan sosial dapat terjadi pada berbagai tingkat kehidupan manusia. Ruang gerak perubahan itupun berlapis lapis, dimulai dari kelompok terkecil atau mulai dari tingkat individu keluarga hingga tingkat dunia.³³ Seperti teori perubahan terencana yang diperkenalkan Kurt Lewin untuk membedakan perubahan yang sengaja digerakkan dan direncanakan dalam sebuah organisasi, dan jenis perubahan lainnya.³⁴

Berdasarkan jangka waktu terjadinya perubahan sosial, Ibrahim membedakan antara perubahan jangka pendek dan perubahan jangka panjang. Berdasarkan tingkat terjadinya perubahan sosial dapat dibedakan pada tingkat *mikro* (individu), tingkat *intermediate* (kelompok), dan tingkat *makro* (masyarakat) dengan cara menyelenggarakan dua macam dimensi sebagai titik tolak melihat terjadinya perubahan sosial yaitu "jangka waktu" dan tingkat terjadinya (subjek perubahan).

Sebagian pakar mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi dari bentuk-bentuk masyarakat. Struktur diartikan sebagai pola perilaku yang dijadikan sebagai ukuran dasar dalam sistem sosial, sedang fungsi adalah setiap konsekuensi dari struktur sejauh mempengaruhi struktur-struktur lain.³⁵

Adanya interaksi sosial akan menimbulkan proses sosial di

³³Lihat Achmat Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 56-76.

³⁴Uyung Sulaksamana, *Managemen Perubahan*, (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2004), 55.

³⁵Lihat dalam Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, ter. Alimandan (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 4. Lihat juga dalam Soelaiman, *Dinamika Masyarakat Transisi*, 41.

dalam masyarakat. Hal ini akan menentukan arah norma dan nilai-nilai dalam organisasi-organisasi, lembaga sosial, dan bentuk sosial yang lainnya, di mana bentuknya tidak akan berubah dan tetap dalam kerangka kerjanya. Memang, perubahan sosial dan perubahan kebudayaan sulit dipisahkan.

Mac.Iver, sebagaimana dikutip Suwito, menjelaskan perubahan sosial sebagai perubahan dalam hubungan sosial (*social relationship*) atau sebagai perubahan keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial. Sementara Samuel Koenig memandang perubahan sosial sebagai proses modifikasi yang terjadi dalam pola kehidupan manusia. Modifikasi-modifikasi tersebut terjadi karena sebab-sebab intern maupun ekstern.³⁶

Namun, secara teoritis dapat dikatakan bahwa perubahan sosial mengacu kepada perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur sosial dan hubungan sosial. Adapun perubahan kebudayaan mengacu kepada perubahan-perubahan pada pola perilaku, termasuk teknologi. Perubahan teknologi mengakibatkan perubahan lingkungan dan mengaturnya hingga timbul perubahan-perubahan atau modifikasi kebiasaan dan lembaga sosial.

Studi ini menggunakan satu dimensi perubahan sosial dari Himes dan Moore, yaitu perubahan pada dimensi struktural. Secara lengkap Himes dan Moore mengatakan adanya tiga macam dimensi perubahan sosial, yaitu perubahan dimensi struktural, kultural, dan interaksional.³⁷

Pertama, dimensi perubahan struktural, dimensi perubahan

³⁶M. Fahmi, *Islam Transendental Menelusuri Jejak-Jejak Pemikiran Islam Kuntowijoyo*, (Yogyakarta, Pilar Media, 2005), 148

³⁷Himes J.S. and Moore, *Study of Sociology* (Atlanta: Scoot Foreman, 1964), 430.

ini mengacu kepada perubahan yang terjadi dalam bentuk struktural masyarakat, menyangkut perubahan dalam peranan, munculnya peranan baru, perubahan dalam struktur kelas sosial, dan perubahan dalam lembaga sosial. Secara ringkas dimensi perubahan struktur ini meliputi: 1) bertambahnya atau berkurangnya kadar peranan, 2) menyangkut aspek perilaku kekuasaan, adanya peningkatan atau penurunan sejumlah peranan, 3) terjadinya pergeseran dari wadah atau kategori peranan, 5) terjadinya modifikasi saluran komunikasi di antara peranan, dan 6) terjadinya perubahan dari tipe dan fungsi sebagai akibat dari struktur.

Kedua, dimensi perubahan kultural, dimensi ini mengacu kepada perubahan kebudayaan dalam masyarakat, seperti: adanya penemuan baru (*discovery*) dalam berpikir (ilmu pengetahuan), pembaharuan hasil (*invention*) teknologi, kontak dengan kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya difusi dan peminjaman kebudayaan. Kesemuanya itu meningkatkan adanya integrasi unsur-unsur baru ke dalam kebudayaan. Bentuk-bentuk lama akan diganti baru yang secara tidak langsung menimbulkan difusi kebudayaan. Bentuk umum dan bentuk baru dapat diganti dan dimodifikasi secara terus-menerus. Inovasi kebudayaan, difusi dan integrasi kesemuanya adalah melibatkan proses perubahan-perubahan yang ada dalam dimensi kultural.

Ketiga, dimensi interaksional, dimensi perubahan ini mengacu kepada adanya perubahan hubungan sosial di dalam masyarakat, yang dapat diidentifikasi ke dalam beberapa dimensi. Modifikasi dan perubahan dalam struktur dari komponen masyarakat bersamaan dengan pergeseran dari kebudayaan membawa perubahan dalam relasi sosial. Hal seperti frekuensi, jarak sosial, peralatan, keteraturan dan peranan undang-undang, merupakan ske-

ma pengaturan dari dimensi spesifik perubahan relasi sosial.

Contoh yang dapat diajukan untuk menggambarkan perubahan sosial dimensi interaksional ini adalah perubahan sosial di pedesaan yang terjadi karena adanya urbanisasi, yang dapat dianalisis dalam hal variasi dan frekuensi kontak sosialnya; pergeseran dari pola hubungan primer ke pola hubungan sekunder atau group; pergeseran dari interaksi di antara status kehidupan yang sama kepada interaksi kontraktual yang banyak memutuskan tali pesaudaraan; pergeseran dari bentuk-bentuk kerja sama kepada hubungan yang penuh dengan persaingan dan sendiri-sendiri; pergeseran dari nilai-nilai individu sebagai pribadi dengan hubungan yang bersifat pribadi menjadi pola hubungan yang impersonal.

Dimensi interaksional secara ringkas dapat disebutkan sebagai berikut: 1) perubahan dalam frekuensi, seperti: frekuensinya, jumlah atau kontinuitas, sampai kepada hal yang bertentangan, 2) perubahan dalam jarak sosial, seperti: hubungan intim, informal, formal, dan perubahan dalam arah yang bertentangan, 3) perubahan perantaraan, seperti dari perlakuan partisipan di dalam suatu hubungan menjadi pribadi sebagai tujuan akhir, berubah maknanya menjadi impersonal, atau perubahan yang arahnya bertentangan, 4) perubahan dari aturan atau pola-pola, seperti hubungan antara status yang sama dengan arah yang horizontal menjadi pergaulan dengan status yang tidak sama dan arah hubungannya vertikal, atau berubah dalam arah yang bertentangan, 5) perubahan dalam bentuk, seperti dari pola hubungan solidaritas atau sama-sama, meskipun perangkat struktur lengkap, maka akan terpecah melalui sikap pengalaman yang bermusuhan, persaingan dan konflik, atau berubah dalam arah yang berlawanan.

Artinya, perubahan merupakan suatu keniscayaan, yang selalu terjadi di setiap sudut kehidupan, termasuk kehidupan politik kiai. Perubahan yang terjadi dapat dirasakan, tapi sering juga tidak disadari, bahkan dilupakan dan tidak dihiraukan. Proses tersebut berlangsung sepanjang sejarah hidup manusia, pada tingkat lokal, regional dan global yang menggambarkan betapa luasnya cakupan perubahan sosial. Bahkan, karena perubahan sosial merupakan suatu proses yang berkesinambungan, maka penelaahan tentang proses tersebut mempunyai perspektif sejarah evolusioner.³⁸

Dalam terminologi sosiologis, perubahan sosial seringkali disamakan dengan istilah transformasi sosial, yaitu suatu perubahan secara menyeluruh dalam bentuk, rupa, sifat, watak dan sebagainya dalam hubungan timbal balik antar manusia, sebagai individu maupun kelompok. Menurut Soekanto sebagaimana mengutip Kingsley Davis, perubahan sosial terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Contoh yang diberikan oleh Davis adalah munculnya pengorganisasian buruh di dalam masyarakat kapitalis yang telah menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik. Sementara itu, Gillin and Gillin menjelaskan bahwa perubahan sosial merupakan variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan geografis, kebudayaan, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya *difusi* atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.³⁹

³⁸H.A.R. Tilaar, *Perubahan Sosial Dan Pendidikan: Pengantar Pedagogic Transformasi Untuk Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2002), 03.

³⁹Soerjono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 336-337.

B. TRANSISI DEMOKRASI

Pada asensinya, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu Negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas Negara, untuk dijalankan oleh pemerintah Negara tersebut.⁴⁰ konsep ini menekankan kekuasaan yang mutlak berada di tangan rakyat yang dalam pepatah latin dikatakan bahwa, “*vox populi vox Dei*” (suara rakyat adalah suara Tuhan).⁴¹ Karenanya, dalam konsep demokrasi, kedaulatan rakyat tidak boleh dikompromikan dengan apa dan siapapun, kehendak rakyat seakan-akan kehendak Tuhan. Di samping itu, ada pepatah yang mengatakan, “*salus populi supreme lex*” (kekuasaan rakyat adalah hukum yang paling tinggi). Oleh karena itu, dalam demokrasi ditetapkan bahwa hukum yang paling tinggi adalah kehendak rakyat.⁴²

Konsep demokrasi yang menekankan kedaulatan tertinggi untuk mengelola kehidupan suatu bangsa atau Negara ada di tangan rakyat, mengharuskan setiap individu memiliki posisi yang sama untuk menentukan ke arah mana suatu masyarakat atau bangsa harus melangkah. Hal ini sejalan dengan doktrin politik dan dari konsep ini, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam agenda penyusunan kebijakan-kebijakan yang nantinya akan menjadi ketentuan dalam hidup bernegara.⁴³

Sebagai sebuah sistem politik yang menekankan kekuasaan

⁴⁰ H.A.R. Tilaar, *Perubahan...*, 27

⁴¹ Amin Rais, “masalah-masalah yang dihadapi Bangsa Indonesia”, *Jurnal Milenium: Agama dan Tamaddun*, No.1. Th.1 (Januari-April, 1998), 7.

⁴² *Ibid*

⁴³ Thamrin, “Gagasan Demokrasi Amien Rais: Periode 1994-2005”, *Tesis Ilmu Politik* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), 10

yang mutlak berada di tangan rakyat, konsep demokrasi mempunyai tiga kata penting yang menjadi landasan, yaitu *freedom* (kebebasan) *equality* (persamaan), dan *fraternity* (persaudaraan). Dalam kaitan ini Amien Rais, reformis Muslim Indonesia menjelaskan esensi dari demokrasi adalah kebebasan menyatakan pendapat; kebebasan beragama; kebebasan dari rasa takut; kebebasan untuk sejahtera; kebebasan rakyat dalam berpartisipasi politik untuk menentukan nasibnya sendiri; dan berjalannya keseimbangan (*check and balances*), serta tegaknya hukum.⁴⁴

Sementara, Hendri B. Mayo sebagaimana yang dikutip Miriam Budiardjo dalam dasar-dasar ilmu politik, mengemukakan beberapa nilai yang mendasari demokrasi, di antaranya:

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga;
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah;
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur;
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minuman;
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkat laku;
6. Menjamin tegaknya keadilan.⁴⁵

Dalam bukunya *Apa Demokrasi itu?* Diane Ravitch mengemukakan soko guru demokrasi adalah kedaulatan rakyat; pemerintahan berdasarkan persetujuan dari diperintah; kekuasaan mayoritas

⁴⁴M. Amin Rais, *Jurnal Milenium...*, 6.

⁴⁵Hendri B. Mayo dalam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1997), 62.

tas; hak-hak minoritas; jaminan hak asasi manusia.⁴⁶ Pemilihan yang bebas dan jujur; persamaan di depan hukum;⁴⁷ Proses hukum yang wajar; pembatasan pemerintah secara konstitusional; pluralisme social, ekonomi dan politik; nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat.⁴⁸

Tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan Diane Ravitch, Sadek J. Sulayman, juga mengemukakan sejumlah prinsip yang diyakini sebagai standar bakunya demokrasi, seperti: kebebasan berbicara setiap warga Negara; pelaksanaan pemilu untuk menilai apakah pemerintahan yang berkuasa layak didukung kembali atau harus diganti; kekuasaan dipegang oleh suara mayoritas tanpa mengabaikan control minoritas; peranan partai politik yang sangat penting sebagai wadah aspirasi politik rakyat; pemisahan kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif; subspremasi hukum (semua harus tunduk pada hukum); semua individu bebas mela-

⁴⁶Secara historis hak asasi manusia sebagaimana yang saat ini dikenal (baik yang dicantumkan dalam berbagai piagam mau pun UUD), memiliki riwayat perjuangan panjang bahkan sejak abad ke-13 perjuangan untuk mengukuhkan gagasan hak asasi manusia ini sesudah dimulai segera setelah ditanda tangannya *Magna Charta* pada 1215 oleh Raja John Lackbland maka seringkali peristiwa ini dicatat sebagai permulaan dari sejarah perjuangan hak-hak asasi manusia, sekalipun sesungguhnya piagam ini belum merupakan perlindungan terhadap hak-hak asasi sebagaimana yang dikenal surat ini. Kusnardi, Muhammad Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Pusat Studi hokum Tata Negara UI & C.V. Sinar Bhakti, 1981), 307.

⁴⁷Persamaan yang dimaksud adalah bahwa setiap anggota masyarakat mempunyai hak yang sama dalam berpartisipasi di pemerintahan. B.Yedi Purwanto, "Masa Depan Partai Politik Islam dalam Pertarungan Pemilu", *Jurnal Sosioteknologi*, edisi 16. Th.8 (April 2009), 31.

⁴⁸Diane Ravitch, *Apa Demokrasi itu?*, 6

kukan apa saja tanpa boleh dibelenggu.⁴⁹

Robert A. Dahl, dalam Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, juga mengemukakan enam prinsip yang harus ada dalam sistem Negara demokrasi sebagai Demokrasi dalam Islam berikut:

1. Para pejabat yang dipilih . Pemegang atau kendali terhadap segala keputusan pemerintah mengenai kebijakan secara konstitusional berada di tangan pejabat yang dipilih oleh warga Negara. Jadi, pemerintah demokrasi modern ini merupakan demokrasi perwakilan
2. Pemilihan yang jujur, adil, bebas, dan periodik. Prapejabat ini dipilih melalui pemilu.
3. Kebebasan berpendapat. Warga negara berhak menyatakan pendapat mereka sendiri tanpa halangan dan ancaman dari penguas.
4. Akses informasi-informasi alternatif.
5. Otonomi asosilasional, yakin warga negara berhak membentuk perkumpulan-perkumpulan atau organisasi-organisasi yang leratif bebas, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan
6. Hak kewargenegaraan yang inklusif.⁵⁰

Sedangkan menurut Urfsky, dalam konsep demokrasi juga terdapat 11 (sebelas) prinsip yang diyakini sebagai kunci untuk memahami bagaimana demokrasi bertumbuh kembang. Sebelas prinsip utama demokrasi dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi

⁴⁹Sadek J.Sulayman, "Apakah system demokrasi haram?" dikutip dari <http://www.Syariah Online.com>

⁵⁰Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif, Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 119-120.

Proses pembuatan undang-undang harus dilakukan dengan aturan-aturan tertentu. Yaitu, harus ada cara yang telah disepakati untuk pembuatan dan perubahan undang-undang dan area-area tertentu yang disebut sebagai hak-hak individu yang tidak bias disentuh oleh kehendak mayoritas. Konstitusi adalah sebuah produk hukum, namun pada saat yang bersamaan ia harus lebih sekadar hal itu. Ia adalah dokumen organik dari pemerintahan, yang mengatur kekuasaan dari pilar-pilar pemerintahan yang berbeda sekaligus acuan batasan kewenangan pemerintah.

2. Pemilihan umum yang demokrasi

Sebaik apa pun sebuah pemerintahan dirancang, ia tidak bias dianggap demokratis kecuali para pejabat yang memimpin pemerintahan itu dipilih secara bebas oleh warga Negara dalam cara yang terbuka dan jujur untuk semuanya.

3. Federalism, pemerintahan Negara bagian dan local

Sebuah Negara federal mempunyai sebuah keunikan, ketika kekuasaan dan wewenang dibagi dan dijalankan oleh pemerintahan local, Negara bagian, dan nasional. Namun, jika model ini tidak cocok untuk sebuah negara, tetap ada pelajaran yang bias dipetik. Semakin jauh suatu pemerintahan dari rakyatnya, semakin kurang efektif dan semakin kurang mendapat kepercayaan.

4. Pembuatan undang-undang

Kunci pembuatan hukum (undang-undang) yang demokratis tidak terletak pada tata cara atau bagaimana atau bahkan forum dimana peraturan itu dihasilkan, tetapi pada sifat keterbukaan prosesnya bagi penduduk dan perlunya pemahaman terhadap harapan rakyat.

5. Sistem peradilan yang independen

Pengadilan bias menjadi sangat kuat dalam demokrasi dan melalui banyak cara ia adalah tangan yang menafsirkan dan memberlakukan aturan-aturan yang ada di konstitusi.

6. Kekuasaan lembaga kepresidenan

Semua masyarakat modern harus memiliki pimpinan eksekutif yang mampu memikul tanggungjawab pemerintahan mulai dari administrasi sederhana sebuah program sampai menggerakkan angkatan bersenjata untuk membela Negara selama perang.

7. Peran media yang bebas

Hal yang terkait erat dengan hak public untuk tahu adalah media yang bebas. Yaitu, surat kabar, jaringan radio, dan televisi yang bias menginvestigasi jalannya pemerintahan dan melaporkannya tanpa takut adanya penuntutan.

8. Peran kelompok-kelompok kepentingan

Pemerintah harus memberdayakan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, baik itu partai politik maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan guna menyampaikan kehendak dan tuntutan rakyat.

9. Hak masyarakat untuk tahu

Dalam demokrasi, pemerintah seharusnya bersikap terbuka, yang artinya gagasan dan keputusannya harus terbuka bagi pengujian publik secara saksama. Sudah barang tentu tidak semua langkah pemerintah harus dipublikasikan. Namun, rakyat mempunyai hak untuk mengetahui bagaimana uang pajak mereka dibelanjakan, apakah penegakan hukum efisien dan efektif, dan apakah wakil-wakil terpilih mereka bertindak secara bertanggungjawab.

10. Melindungi hak-hak minoritas

Jika “ demokrasi” di artikan sebagai kehendak mayoritas, salah satu masalah besar adalah bagaimana minoritas diperlakukan. Minoritas tidak diartikan sebagai orang-orang yang memilih lawan dari partai yang memenangkan pemilihan umum, tetapi pada mereka yang jelas-jelas berbeda dengan mayoritas karena alasan ras, agama, atau keetnisan.

11. Control sipil atas militer

Dalam demokrasi, militer bukan hanya harus berada dibawah kontrol kewenangan sipil sepenuhnya, melainkan harus memiliki budaya yang menegaskan bahwa peran tentara adalah sebagai abdi dan bukannya penguasa masyarakat.⁵¹

Selain beberapa prinsip diatas, dalam demokrasi juga terdapat empat fungsi yang saling terkait dan tidak terpisahkan satu dengan yang lain, fungsi-fungsi tersebut sebenarnya merupakan implementasi dari prinsip-prinsip demokrasi.⁵²

1. Demokrasi sebagai kebebasan (*freedom*)

Demokrasi sebagai kebebasan (*freedom*) artinya dengan demokrasi orang akan bebas melakukan apa saja. Setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri, berhak mengekspresikan apa yang ia kehendaki lewat perbuatan atau perilaku manusia secara alamiah ingin hidup bebas. Kebebasan sebagai salah satu prinsip demokrasi harus disertai pula dengan nilai etis dan normative sehingga berbenturan dengan norma yang berkembang di masyarakat.

⁵¹Urofsky, M.I. *Jurnal Demokrasi* (Office of Information Program, U.S. Department of State, 2001), 2-5

⁵²Sahlm Muhfuzd dkk, *Pendidikan...*, 59-61.

2. Demokrasi sebagai penghormatan akan martabat orang lain (*as respect for dignity of person*)

Artinya, dengan demokrasi, seseorang akan memperlakukan orang lain sebagaimana dirinya atau memperlakukan orang lain sebagai manusia yang mempunyai martabat dan akan diperlakukan sebagaimana adanya, memperlakukan manusia sebagai manusia yang disebabkan oleh kemanusiaannya, bukan karena jenis kelamin, ras, suku, dan lain sebagainya.

3. Demokrasi sebagai persamaan (*equality*)

Demokrasi sebagai persamaan artinya setiap orang dalam kelompok masyarakat tentu mempunyai hak yang sama. Sebab, sudah menjadi kesepakatan umum (*consensus*) bahwa manusia dilahirkan sama dalam hak dan kewajibannya.

4. Demokrasi sebagai wahana untuk berbagi (*sharing*)

Demokrasi sebagai wahana untuk berbagi (*sharing*) dengan kelompok lain artinya kelompok mayoritas yang sedang berkuasa tetap menghargai kelompok minoritas dengan cara membagi kekuasaan. Hal ini dilakukan agar haka-haka kelompok minoritas tetap terjamin dengan membuka keran komunikasi antar kelompok.

Keempat hal diatas merupakan prinsip sekaligus fungsi utama demokrasi. Hal ini disebabkan dalam hampir semua Negara demokrasi keempat unsure ini akan ditemukan. Selanjutnya, jika dianalisis lebih mendalam, meskipun keempat prinsip diatas selalu kita temui dalam Negara demokrasi, secara filosofis ternyata 3 (tiga) prinsip terakhir sesungguhnya hanyalah implikasi dari prinsip yang pertama, yaitu kebebasan (*freedom*). Musyawarah (berbagi: *sharing*) misalnya, prinsip ini harus ada karena dalam demokrasi kedaulatan dan kekuasaan sepenuhnya berada di tangan ra-

kyat sehingga suara dan pendapat seluruh rakyat harus didengarkan.

Demikian, halnya dengan prinsip persamaan. Hal ini karena demokrasi memandang secara filosofis status manusia sebagai pusat dari segalanya (*humanisme*) mengharuskan manusia berkedudukan sama tanpa memandang status apapun.

Karenanya, masa transisi demokrasi yang berlangsung di Indonesia adalah sebuah momentum bagi lahirnya keterbukaan ruang publik yang ditandai dengan partisipasi dan penguatan hak-hak politik warga masyarakat. Transisi demokrasi mensyaratkan adanya kekuatan *civil society* (masyarakat sipil) dalam mendukung terciptanya kehidupan demokrasi. Kekuatan sipil itu tergantung kepada beberapa persyaratan,⁵³ yaitu: (1) adanya ruang publik yang bebas, setiap individu mempunyai posisi yang sama satu sama lain dalam melakukan transaksi-transaksi wacana dan praktik politik tanpa mengalami tekanan dan distorsi, (2) keadaan yang demokratis memungkinkan adanya kebebasan bagi warga negara, terpeliharanya hak-hak asasi manusia dan ketertiban umum, (3) kuatnya sikap toleran yang memungkinkan adanya saling menghargai setiap perbedaan dan menghormati aktivitas milik orang lain, dan (4) keadilan sosial-ekonomi yang menjadi basis kesetaraan dalam partisipasi.

Indonesia memasuki masa transisi demokrasi sejak runtuhnya Orde Baru pada Mei 1998 yang memberikan harapan baru bagi tumbuhnya nilai-nilai demokrasi dan penguatan masyarakat sipil. Masa transisi demokrasi bukan berarti Indonesia secara oto-

⁵³Lihat Yudi Latif, "Ruang Publik, Partisipasi dan Kekerasan,:" dalam Syahdatul Kahfi (ed.), *Terorisme Di Tengah Arus Global Demokrasi* (Jakarta: SPECTRUM, 2006), 104.

matik menjadi negara demokratis. Samuel Huntington pernah mencatat bahwa jatuhnya rezim otoriter hampir selalu ditandai dengan lahirnya perasaan gembira dengan penuh semangat.⁵⁴ Luapan yang terkesan ilusif itu, didasari oleh impian warga masyarakat akan lahirnya "gelombang demokratisasi".⁵⁵ Jatuhnya rezim otoriter paling tidak memberikan pengandaian baru munculnya kemenangan demokrasi dalam sebuah negara. Namun, seringkali pula terjadi bahwa asumsi kukuhnya demokrasi itu terpengkas oleh rezim pengganti yang kurang lebih sama tidak demokratisnya dengan rezim sebelumnya. Apa yang digambarkan oleh Huntington ini menjadi fenomena *par-excellence* pasca mundurnya Soeharto sebagai presiden selama kurang lebih 32 tahun. Luapan kegembiraan hampir menyelimuti semua lapisan masyarakat yang mempunyai kesadaran atas kebijakan Soeharto dalam proses penyelenggaraan negara yang militeristik. Luapan paling kentara adalah munculnya kelompok penekan (*pressure group*) ekstra-parlemen-ter, khususnya dari mahasiswa. Banyak dari mereka meluapkan kegembiraan dengan cara melakukan sujud syukur setelah mendengarkan pengunduran Soeharto Mei 1998.

Sejak saat itu, perubahan-perubahan penting terus dilakukan di berbagai segmen kehidupan kebangsaan. Perubahan paling fundamental ditunjukkan pada format politik negara. Perubahan

⁵⁴Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga* (Jakarta: Grafiti Press, 1997), 216.

⁵⁵Gelombang demokrasi secara sederhana dimaknai dengan "sekelompok transisi dari rejim non-demokratis ke rejim demokratis yang dalam kurun waktu tertentu dan jumlahnya secara signifikan lebih banyak daripada transisi menuju ke arah sebaliknya...biasanya mencakup liberalisasi atau demokratisasi sebagian pada sistem-sistem politik yang tidak sepenuhnya menjadi demokratis. Ibid., 44.

tersebut ditandai oleh perubahan Undang-Undang Kepartaian maupun Undang-Undang Pemilihan Umum yang memberikan kebebasan dan prosedur sangat longgar untuk mendirikan partai politik. Meski perubahan-perubahan tersebut masih dalam tingkat yang sangat terbatas, tetapi demokrasi transisional menjadi fenomena yang memunculkan diskursus sangat menarik. Masa transisional itu ditandai dengan munculnya kebangkitan gerakan-gerakan Islam. Kenyataan ini membuktikan tesis yang pernah dikemukakan William Liddle tentang lahirnya gerakan Islam pasca runtuhnya Orde Baru.⁵⁶ Selanjutnya, kesadaran itu juga muncul pada tokoh agama, termasuk kiai di daerah. Bahkan, sebagai bentuk partisipasi, di antaranya secara terbuka berani melakukan dukungan politik.

Faktor penting yang dapat ditunjuk untuk memberikan peluang timbulnya kesadaran-kesadaran itu ialah "kebebasan" dan "keterbukaan" yang melekat pada kedirian demokrasi itu sendiri. Era transisi demokrasi di Indonesia membawa implikasi signifikan bagi tumbuh dan berkembangnya aspirasi masyarakat yang selama masa Orde Baru terhambat oleh kebijakan depolitisasi dan penyeragaman dalam segala sektor kehidupan publik.

Sebagaimana diketahui, depolitisasi Islam masa Orde Baru mencapai puncaknya berkaitan dengan kebijakan fusi partai-partai politik Islam yang terjadi tahun 1973 dan dengan ideologi politik yang dimanifestasikan dalam kebijakan yang mengharuskan semua partai politik dan organisasi massa untuk menerima

⁵⁶Lihat William Liddle, "Skriptualisme Media Dakwah: Suatu Bentuk Pemikiran dan Aksi Politik Islam di Indonesia Masa Orde Baru," dalam Mark R. Woodward ed. *Jalan Baru Islam: Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia* (Bandung: Mizan, 1999), 304

Pancasila sebagai satu-satunya ideologi pada tahun 1985. Meskipun pada akhirnya perubahan terjadi pada akhir 80-an, yaitu ketika Orde Baru menerapkan kebijakan akomodasi politik. Lahirnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) merupakan bukti akomodasi politik Orde Baru terhadap pemikiran kalangan Islam untuk dipertimbangkan dalam kebijakan nasional.⁵⁷

C. PARTISIPASI POLITIK

Ada perbedaan mendasar antara penganut teori klasik dengan teori elitis tentang partisipasi politik. Urusan demokrasi menurut teori klasik lebih ditentukan oleh partisipasi warga negara, sementara teori yang kedua lebih memandang demokrasi sebagai urusan kelompok elit karena mereka lebih bisa berperilaku sebagai demokrat dalam situasi politik. Apa sebenarnya partisipasi politik itu? Partisipasi politik adalah berbagai aktivitas yang dilakukan oleh individu-individu warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilihan aparat pemerintah.⁵⁸ Mengutip pendapat dari Brady, Mujani mengatakan bahwa dalam semua definisi oleh para pakar tentang bahasan partisipasi politik selalu mencakup empat hal konsep dasar, yaitu: konsep tentang aktivitas atau aksi, warga negara biasa, politik, dan pengaruh.

Aktivitas atau aksi dalam partisipasi politik merupakan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang. Perasaan dekat dengan partai politik atau benci kepada kebijakan pemerintah bukan dalam kategori aktivitas ini dan karenanya tidak dapat disebut ke dalam

⁵⁷Lihat M. Imdadun Rahmat et.al., "Partai-Partai Islam: Transformasi Gerakan Islam dan Ruang Demokrasi," dalam *Tashwirul Afkar*. Edisi No. 4 Tahun 1999.

⁵⁸Lihat Saiful Mujani, *Muslim Demokrat*, 256

kategori partisipasi politik. Pemberian suara untuk partai politik dalam pemilu, penandatanganan petisi yang menunjukkan ketidaksetujuan terhadap suatu kebijakan pemerintah atau proses menentang keputusan pemerintah merupakan contoh aktivitas yang dapat digolongkan ke dalam istilah partisipasi politik. Bahkan, menurut Mujani, diskusi politik bukan termasuk bentuk partisipasi politik, tetapi lebih tepat dikatakan sebagai bentuk dari keterlibatan politik.⁵⁹

Dalam teori demokrasi klasik, warga negara dipandang tertarik untuk dan mau berpartisipasi dalam politik. Mereka cukup paham mengenai proses pemerintahan dan alternatif pemecahannya terhadap masalah yang muncul. Teori ini percaya bahwa partisipasi politik adalah alat untuk memperoleh kebijakan yang diharapkan. Sehubungan dengan karakteristik ini, maka demokrasi dapat dipandang sebagai kontrol pemerintahan oleh warga negara. Kontrol ini sampai pada tingkat tertentu sangat tergantung kepada partisipasi politik warga negara. Dalam sebuah negara demokrasi, preferensi warga negara berbeda dari tingkat satu ke tingkat lainnya, dan seringkali perbedaan ini menjadikan demokrasi sebagai sebuah bentuk pemerintahan fleksibel. Pertanyaannya, partisipasi politik bukan sekedar aktivitas atau aksi saja, melainkan aktivitas atau aksi yang dilakukan oleh warga negara biasa, bukan oleh elit pemerintah. Aksi elit pemerintah memang bersifat politis, tetapi bukan merupakan bentuk dari partisipasi politik.

Demikian pula dengan aktivitas sosial yang tidak diarahkan untuk mempengaruhi berlangsungnya kebijakan-kebijakan pemerintah, bukan termasuk dalam kategori partisipasi politik. Aktivi-

⁵⁹Ibid., 257

tas dalam perkumpulan sosial, seperti kegiatan sosial dalam klub olah raga dan gereja. Keduanya bukan juga termasuk partisipasi politik karena tidak bersifat politik dan tidak diarahkan untuk mempengaruhi kebijakan atau aktivitas pemerintah, meski mungkin mempengaruhi aksi politik seseorang. Yang jelas, partisipasi politik merupakan sebuah tindakan sukarela, yang berarti pesertanya tidak dipaksa. Dalam menentukan variabelnya, studi-studi awal tentang konsep partisipasi politik bahkan berupaya menunjukkan dimensi skala yang mengindikasikan seberapa besar seseorang berpartisipasi dalam proses politik di sebuah negara.

Kaase dan Marsh (1979) sebagaimana dikutip Mujani mengatakan bentuk partisipasi politik yang berbeda, konvensional dan tidak konvensional. Bentuk konvensional melibatkan segala aktivitas oleh warga negara biasa untuk mempengaruhi hasil akhir (*outcomes*) dari proses politik yang sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku, seperti *voting*, menjadi kandidat yang dipilih untuk menduduki jabatan politik tertentu, atau kampanye. Partisipasi politik tidak konvensional adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh warga negara biasa dengan norma hukum dan kebiasaan yang mengatur partisipasi politik di bawah rezim tertentu, seperti demonstrasi, mogok kerja, atau perusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum.⁶⁰ Ukuran partisipasi atau aksi politik menurut pandangan Kaase dan Marsh tidak mencakup jumlah pemberi suara dalam pemilu. Mereka juga memasukkan item protes politik (partisipasi yang tidak konvensional). Artinya, partisipasi tidak hanya berupa demonstrasi umum, melainkan mengorganisasikan dan menandatangani petisi, demonstrasi politik, memblokir lalu lintas, boikot politik, menduduki bangunan publik, termasuk me-

⁶⁰Ibid., 258.

rusak fasilitas publik.

Para ahli ilmu politik berbeda pendapat mengenai partisipasi politik. Apa yang menjadi ukuran dalam partisipasi politik, berapa unsur dalam partisipasi politik yang dapat ditoleransi, dan lain sebagainya. Verba, Nie, dan Kim yang dikutip Mujani mengukur partisipasi politik dengan 20 item yang terdapat dalam empat unsur: *voting* (tiga item), aktivitas kampanye (enam item), aktivitas kemasyarakatan (delapan item), menghubungi pejabat publik (dua item). Verba, Scholzman, Brady menambahkan kontribusi dalam kampanye dan protes, selain keempat unsur tersebut di atas.⁶¹

Di Indonesia khususnya, pembahasan secara sistematis tentang ukuran-ukuran partisipasi politik jarang dilakukan. Hal ini disebabkan oleh karena demokrasi sendiri yang disebut-sebut sebagai fenomena yang masih jarang dipraktikkan. Memang ada beberapa studi tentang tema ini, tetapi lebih terbatas kepada persoalan tentang pemilihan partai daripada tentang partisipasi politik. Studi-studi itu akhirnya tidak dapat mengeksplorasi lebih jauh tentang karakteristik partisipasi politik bangsa Indonesia. Untuk lebih mudah mengamati partisipasi politik di Indonesia, Mujani membuat tabel tentang ukurannya,⁶² sebagai berikut:

Tabel 1
Unsur dan Item Partisipasi Politik

No	Unsur	Item
1	<i>Voting</i>	1. ...memilih sebuah partai politik
2	Kerja kampanye	2. ...meyakinkan orang lain untuk memilih partai politik tertentu

⁶¹Ibid.

⁶² Ibid., 260

		3. ...membantu sebuah partai politik secara sukarela, misalnya menyebarkan selebaran, mengorganisasikan kampanye 4. ...menghadiri kampanye partai politik 5. ...menggunakan atribut partai pada pakaian, sepeda, rumah, dan lainnya
3	Kerja kemasyarakatan	6. ...menghubungi kantor publik atau pejabat lokal atau nasional untuk kepentingan umum 7. ...bekerjasama dengan orang lain dalam sebuah komunitas untuk memecahkan setiap masalah bersama 8. ...mengorganisasi anggota masyarakat untuk memecahkan setiap masalah masyarakat. 9. ...menghadiri pertemuan masyarakat untuk memecahkan setiap masalah masyarakat
4	Petisi	10. Mengorganisasi petisi 11. Menandatangani petisi
5	Protes	12. Demonstrasi 13. Boikot 14. Mogok 15. Menduduki bangunan publik 16. Memblokir lalu lintas 17. Merusak fasilitas umum

[***]

BAB 3



DINAMIKA PARTISIPASI POLITIK KIAI

A. KIAI: PERAN DAN KATEGORI

Kiai dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga gelar berbeda. *Pertama*, sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat, seperti nama pusaka di keraton. *Kedua*, gelar kehormatan bagi orang tua pada umumnya. *Ketiga*, gelar yang diberikan kepada orang yang mempunyai keahlian dalam agama Islam yang memimpin pesantren dan mengajar kitab-kitab klasik pada santrinya.⁶³ Gelar kiai yang terakhir, yaitu orang yang mempunyai

⁶³Lihat Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan*

pengetahuan agama secara mendalam dan memimpin pondok pesantren serta mengajarkan kitab-kitab klasik kepada santri merupakan gelar yang paling populer di kalangan masyarakat Islam tradisional. Namun, dalam perkembangannya, sebutan kiai juga diberikan kepada orang-orang yang mempunyai kelebihan atau keahlian di bidang ilmu agama Islam ataupun tokoh masyarakat, meskipun yang bersangkutan tidak memimpin atau memiliki santri yang bertempat tinggal di pesantren.⁶⁴

Kajian awal tentang posisi kiai dalam masyarakat Islam dilakukan Dhofier. Menurutnya, kiai adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang yang beragama Islam yang memiliki atau memimpin pesantren dan mengajar kitab-kitab klasik kepada santrinya. Kajian Dhofier di Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur, yang diperuntukkan dalam rangka penyusunan disertasinya, disebut oleh sebagian akademisi telah menemukan banyak aspek yang sebelumnya tidak diungkap peneliti lain. Meskipun relevansi pandangan itu sekarang memerlukan kajian kembali seiring dengan dinamika dan perkembangan masyarakat yang terjadi di kalangan Islam pesantren.

Andree Feillard, pengamat Islam yang mempunyai kompetensi tentang dunia pesantren di Indonesia mengemukakan bahwa meski kata "kiai" sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Islam di Indonesia, tetapi makna kata tersebut kini sedang mengalami disorientasi. Feillard mengatakan bahwa banyak dari kalangan Islam yang sebenarnya tidak termasuk dalam kategori kiai, tetapi ternyata mereka telah menyandang gelar kiai.

Hidup Kiai (Jakarta: LP3ES, 1994), 55.

⁶⁴Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintas Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan* (Jakarta: LSIK, 1999), 144.

Misalnya, orang muda yang belum tentu mempunyai pengetahuan agama secara mendalam.⁶⁵ Fenomena tersebut terus bermunculan dan memerlukan kajian lebih mendalam lagi tentang faktor-faktor penyebabnya.

Selanjutnya, kiai mempunyai fungsi yang cukup penting, antara lain: fungsi kiai sebagai pelindung, pendidik, dan motivator. *Pertama*, di dalam masyarakat kiai merupakan pelindung karena kiai adalah orang yang paling disegani. Masyarakat akan datang kepada kiai ketika mereka hendak memecahkan persoalan. Dalam hal ini, kiai adalah figur yang berpengaruh dan menjadi rujukan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan.⁶⁶ *Kedua*, hampir semua kiai di Indonesia mempunyai pondok pesantren. Inilah yang mengantarkan kepada pandangan bahwa kiai mempunyai fungsi sebagai pendidik. Endang Turmudi dalam tulisannya mengatakan bahwa kiai adalah orang yang mempunyai pengetahuan luas tentang Islam. Hal ini menyebabkan kiai selalu mempunyai pengikut yang banyak, yang senantiasa menghadiri pengajian dan ceramahnya.⁶⁷ *Ketiga*, tidak dipungkiri bahwa kiai yang hidup di tengah masyarakat adalah sosok yang sangat lihai dalam pemberi motivasi terhadap munculnya beragam kegiatan masyarakat.

Sesuai dengan perannya, kiai dapat diklasifikasikan menjadi empat: kiai pesantren, kiai tarekat, kiai politik, dan kiai pang-

⁶⁵Lihat Andree Feillard, *NU Vis a Vis Negara Pencarian Isi, Bentuk dan Makna* (Yogyakarta: LKiS, 1999), 356.

⁶⁶Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 23.

⁶⁷Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKiS, 2004), 95.

gung.⁶⁸ *Pertama*, kategori kiai pesantren, yaitu kiai yang mempunyai kegiatan atau memusatkan perhatian kepada aktivitas pengajaran di pesantren dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan. Kiai model ini pada umumnya sangat ditaati oleh para santri, wali santri, dan oleh masyarakat. Mereka berkeyakinan bahwa dengan mentaati kiai, maka akan terjamin eksistensi masa depan dan keselamatannya.

Kedua, kategori kiai tarekat, yaitu kiai yang memusatkan perhatiannya kepada upaya membangun kecerdasan hati (dunia batin). Jumlah pengikut kiai model ini bisa lebih banyak dibanding kiai pesantren, tentunya jika kiai tersebut berkedudukan sebagai mursyid (guru tarekat tertentu). Hubungan guru dan murid dalam tarekat tertentu ini biasanya terjalin sangat kuat, sebagaimana hal ini banyak ditemui pada perkembangan tarekat di Indonesia.

Ketiga, kategori kiai politik, yaitu mereka yang mempunyai perhatian terhadap pengembangan dunia politik praktis. NU misalnya dalam kurun waktu yang cukup lama pernah dikembangkan oleh kiai-kiai dalam kategori ini. Kategori ketiga ini juga biasanya mempunyai pengikut yang cukup banyak.

Keempat, kategori kiai panggung, yaitu mereka yang biasanya menjadi juru dakwah (*muballigh*) yang setiap malam menyampaikan ceramah agama dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka menyebarkan agama melalui kegiatan dakwah. Pengikut kiai kategori ini biasanya tersebar di berbagai tempat. Di antara mereka bahkan ada yang mendapat julukan da'i sejuta umat.

Khusus dalam kategori kiai politik, Imam Suprayogo mengklasifikasikan lagi menjadi beberapa tipologi kiai, yaitu kiai politik, kiai netral, dan kiai yang tidak peduli kepada politik praktis. Se-

⁶⁸Ibid., 32-33.

orang kiai dapat disebut sebagai kiai politik karena banyak melakukan kegiatan politik praktis. Kiai yang dapat dikategorikan dalam tipologi ini adalah kiai yang ada dalam parlemen dan pemerintahan atau kiai yang mempunyai kedudukan sebagai pengurus partai politik. Kiai yang dapat mengambil jarak dengan pemerintah maupun kepentingan partai politik dapat dimasukkan dalam tipologi kiai netral. Adapun tipologi terakhir adalah tipologi kiai yang tidak peduli kepada dunia politik. Tipologi kiai yang terakhir ini banyak ditemui di wilayah-wilayah pedesaan. Mereka ini lebih banyak berkonsentrasi diri pada masalah spiritual dan memberikan pengajaran agama.⁶⁹

Secara lengkap, tipologi kiai dalam pandangan Suprayogo diklasifikasikan menjadi empat kategori.⁷⁰ *Pertama*, kiai spiritual, ialah kiai yang mengasuh pondok pesantren yang lebih menekankan pada upaya mendekatkan diri kepada Tuhan lewat amalan ibadah. Hal yang dipentingkan bagi kiai seperti ini adalah kedalaman spiritual, yaitu berorientasi kepada kehidupan akhirat daripada urusan-urusan tentang keduniaan. *Kedua*, kiai advokatif, ialah kiai yang selain mengasuh pondok pesantren dan aktif mengajar santri di pesantren, juga memperhatikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dan senantiasa berusaha mencari jalan keluarnya. Istilah advokasi sebenarnya lazim digunakan di kalangan hukum dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang artinya pembelaan. Penggunaan istilah advokatif ini untuk menggambarkan kepedulian sosok kiai pada nasib warga yang memerlukan bantuannya. *Ketiga*, kiai politik adaptif, ialah kiai yang selain mengasuh pondok pesantren juga senantiasa peduli pada organisasi

⁶⁹Suprayogo, *Kiai dan Politik*, 50.

⁷⁰ *Ibid.*, 119-121

politik dan kekuasaan. *Keempat*, kiai politik kritis, yaitu kiai yang bersedia menyesuaikan diri dengan kekuatan dominan dan mengambil posisi kritis karena keberanian mengambil sikap berbeda dengan kekuatan dominan.

Masing-masing kategori di atas, dapat diidentifikasi ciri-ciri yang lebih dominan untuk membedakan satu dengan lainnya. Kiai spiritual biasanya menganut paham salafi murni, agama difungsikan sebagai penjaga ketenangan batin, statis dan konservatif, lebih berorientasi kepada kehidupan akhirat, tampak tertutup oleh sentuhan-sentuhan pembaharuan dari luar, termasuk dalam menentukan afiliasi politiknya. Kiai advokatif mempunyai ciri terbuka dan dinamis, agama difungsikan sebagai motivasi penggerak, politik digunakan sebagai alat dakwahnya, menempatkan kepentingan dunia secara seimbang dengan kepentingan akhirat, afiliasi politiknya tidak jelas.

Kiai politik adaptif mempunyai ciri agak mirip dengan kiai advokatif. Perbedaannya, jika kiai politik adaptif lebih dekat dengan penguasa, maka kiai politik advokatif lebih dekat dengan rakyat. Sedang kiai politik kritis mirip dengan kiai spiritual, tetapi lebih memperhatikan kepada dunia politik, dekat dengan umat, melewatkan kehidupan dunia akhirat secara seimbang.

Tabel 2
Karakteristik dan Kategori Kiai

No	Karakteristik	Kategori
1	Tertutup, statis, konservatif; Agama difungsikan sebagai penenang jiwa; Orientasi keakhiratan; Kurang peduli kepada politik; Afiliasi politik jelas PPP.	Kiai Spiritual

2	Terbuka, dinamis, inovatif; Agama difungsikan sebagai dinamisator, dan integrator; Orientasi dunia dan akhirat; Politik sebagai instrumen; Afiliasi politik tidak tampak.	Kiai Advokatif
3	Terbuka, dinamis, inovatif; Agama difungsikan sebagai dinamisator; Dekat dengan penguasa; Orientasi dunia dan akhirat; Politik sebagai instrumen; Afiliasi politik Golkar.	Kiai Politik Adaptif
4	Tertutup, statis, konservatif; Agama difungsikan untuk ketenangan jiwa; Orientasi ke akhirat; Politik sebagai instrumen; Lebih dekat dengan umat; Afiliasi politik PPP	Kiai Politik Kritis

Dalam buku lain, Warsono melakukan penelitian terhadap kiai dan menggolongkan menjadi tiga tipologi kiai, yaitu kiai intelektual organik, kiai intelektual tradisional, dan kiai intelektual simultan.⁷¹ Kategorisasi tersebut didasarkan kepada hasil kajian terhadap kiai dalam menghadapi dominasi negara di era kepemimpinan Abdurrahman Wahid dalam perspektif Antonio Gramsci. Dalam perspektif Gramscian, kiai merupakan sosok yang dapat memposisikan diri sebagai intelektual organik yang berfungsi sebagai aparatatur hegemoni. Akan tetapi, kiai dapat pula berfungsi sebagai intelektual tradisional, yang berusaha menegakkan kebenaran. Kedua fungsi tersebut bisa berjalan seiring, tetapi tidak jarang bertentangan antara satu dengan lain. Perbedaan dua fungsi tersebut mengharuskan kiai menentukan pilihan: apakah me-

⁷¹Warsono, "Wacana Politik Kiai Pada Era Pemerintahan Gus Dur: Apakah sebagai Intelektual Organik atau intelektual Tradisional", Disertasi Doktor, Universitas Airlangga, Surabaya, 2003.

milih sebagai intelektual organik atau menjalankan kedua fungsi itu secara simultan.

Kiai intelektual organik terkait dengan struktur produktif dan politik dari kelompok yang sedang berkuasa. Mereka berfungsi menguniversalisasikan pandangan-pandangan kelompok yang berkuasa dalam rangka mengorganisasi kesepakatan kelompok-kelompok subordinat sehingga para penguasa mendapatkan legitimasi. Mereka tampil sebagai juru kampanye dari penguasa atau kelompok yang berjuang mendapatkan kekuasaan dalam rangka menyebarkan dan menanamkan ideologi secara terorganisir. Sementara yang disebut kiai intelektual tradisional adalah kiai yang memiliki otonomi dan tidak terkooptasi oleh kelompok dominan. Mereka menjalankan fungsi menegakkan kebenaran yang diyakininya, tidak terikat oleh otonomi manapun, kecuali otonomi dirinya sendiri. Mereka adalah para kiai yang menjaga jarak dengan pemerintah dan kekuasaan pada umumnya. Mereka berkonsentrasi mengajar di pesantren dan menjalankan transformasi masyarakat. Kategori kiai ini adalah mereka yang prihatin terhadap kondisi umat, khususnya warga NU dan masyarakat Indonesia pada umumnya yang mengkhawatirkan kondisi carut-marut bangsa.

Sementara kiai intelektual simultan adalah mereka yang berfungsi sebagai intelektual organik, tetapi dalam situasi yang lain mereka dapat berubah fungsinya menjadi intelektual tradisional. Termasuk dalam kategori ini dalam pemerintahan Gus Dur adalah kiai-kiai yang menjadi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang mempunyai latar belakang pendidikan pesantren dan umum.

Menurut Raharjo yang dikutip Anwar, dalam rangka memahami bagaimana kiai mengkonstruksi paham nasionalisme pasca Orde Baru, kiai menggunakan unsur agama yang terlembaga da-

lam kitab klasik, memunculkan beberapa tipologi kiai. *Pertama*, tipologi apologi, yakni mengikuti dengan upaya penyesuaian diri dan adaptasi terhadap proses modernisasi. Sebagian dari kiai bahkan ada yang telah mengambil nilai-nilai Barat, baik disertai dengan konflik batin atau tidak sama sekali.

Kedua, tipologi resistensi, yakni menganggap modernisasi sama dengan westernisasi dan sekularisasi. Akan tetapi, sebagian melakukan resistensi hanya pada tataran menerima nilai-nilai Barat. Ada juga diantara mereka yang melakukan resistensi dengan cara isolasi yang terpaksa harus mereka lakukan meski dengan segala kesulitan, baik karena pengaruh lingkungan, jabatan, atau tekanan dari pihak yang tidak menyetujuinya. *Ketiga*, tipologi tanggapan kreatif, yakni tipologi kiai menempuh model dialogis dengan mengutamakan pendekatan-pendekatan intelektual di dalam menanggapi modernisasi. Penganut pola ini memiliki keyakinan bahwa nilai-nilai dan ajaran agama bisa digali lebih jauh dan diinterpretasikan kembali untuk dijadikan sebagai respon modernisasi secara cerdas dan kreatif.⁷²

B. KIAI DALAM DINAMIKA POLITIK BANGSA

Dalam tradisi masyarakat NU atau dikenal dengan istilah warga nahdhiyyin, kiai merupakan pribadi yang memiliki tempat sangat istimewa. Pendapatnya seringkali menjadi rujukan utama dalam proses pengambilan keputusan, bukan saja dalam masalah-masalah agama, tetapi juga masalah-masalah sosial-politik,⁷³ baik

⁷²Lihat Safi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Cendekiawan Muslim Orde Baru* (Jakarta: Paramadina, 1995), 6-7.

⁷³Keterlibatan Kiai dalam politik sudah muncul secara formal ketika

yang mengikat kepentingan individu maupun kepentingan kolektif.⁷⁴ Oleh karena posisi yang istimewa itu, kelompok kiai selalu ditempatkan sebagai *pressure group* dan *rulling class* yang pengaruhnya dapat melampaui kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin formal.⁷⁵

Keterlibatan kiai yang demikian penting dalam dinamika politik kebangsaan dapat ditelusuri dari peran mereka dari masa penjajahan kolonial. Ziemek dalam penelitiannya mengatakan bahwa para pejuang kemerdekaan melawan penjajah adalah para kiai yang merasa mendapat ilham dan terpanggil memprakarsai guna melawan penjajah.⁷⁶ Terkait itu, Bruinessen menyatakan bahwa dalam penyelidikan lebih seksama, tidak sedikit perlawanan terhadap penjajah Belanda dipimpin para kiai dan haji. Hal ini bisa dilihat dari peran Kiai Kasan Mukmin (Sidoarjo) yang memaklumkan diri sebagai *mahdi*. Ia juga mengajarkan ilmu kedigdayaan untuk berjihad melawan penjajah Belanda.⁷⁷

Pada tahun 1935, para kiai NU juga mendesak Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) untuk bersama GAPPI (Gabungan Partai

partai politik Masyumi sebagai representasi partai politik Islam terbentuk. Ketika NU keluar dari Masyumi yang kemudian menjadikan NU sebagai Partai politik, kiai-pun secara aktif ikut terlibat. Bahkan pada masa Orde Baru sampai Orde Reformasi, kiai masih memegang peran yang cukup strategis, terutama dalam penggalangan massa pada tingkat *grass-root*.

⁷⁴Asep Saifullah Muhtadi, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama: Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif* (Jakarta: LP3ES, 2004) 37-38.

⁷⁵*Ibid.*, 43.

⁷⁶Manfred Ziemek, *Pesantren dan Perubahan* (Jakarta: P3M, 1986), 58.

⁷⁷Martin Van Bruinessen, *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1992), 27.

Politik Indonesia) meningkatkan tuntutan "Indonesia Berparlemen" kepada pemerintah Hindia-Belanda dan Pemerintah Belanda di Den Haag. Namun, tuntutan tersebut ditolak oleh pemerintah Belanda.⁷⁸ Sebagaimana diketahui, MIAI adalah sebuah organisasi Islam seluruh Indonesia. MIAI telah bekerja sama dengan GAPPI sebagai gabungan dari partai-partai politik non-Islam dalam aksi menuntut Indonesia berparlemen. Kedua komunitas tersebut, membentuk Kongres Rakyat Indonesia (KORINDO), menuntut pemerintah Belanda di Den Haag agar rakyat Indonesia diberi hak sendiri untuk memerintah sendiri dengan suatu Badan Perwakilan Rakyat bernama "Parlemen Indonesia".

Para kiai juga telah melancarkan perlawanan terhadap Ordonansi Haji yang diterapkan oleh pemerintah Belanda karena memberatkan jemaah haji yang bermukim di Makkah. Dengan aturan tersebut, mereka harus bermuktamar di Menes Cirebon Jawa Barat pada tahun 1938, memutuskan bahwa Belanda harus mencabut keputusan tersebut dan membebaskan jemaah haji dari keharusan membayar pajak. Fakta ini menunjukkan bahwa Belanda tidak menyukai jemaah haji karena setelah pulang dari tanah suci mereka menjadi tokoh-tokoh pejuang yang siap memimpin masyarakat melawan Belanda.

Selanjutnya, masih dalam konteks hubungan dengan penjajah, pada tahun 1942, dunia pesantren digegerkan dengan penangkapan KH. Hasyim Asy'ary oleh tentara Jepang. Kiai Hasyim Asy'ary yang pada saat itu bertindak sebagai pemimpin tertinggi NU dijabloskan ke dalam penjara di Jombang kemudian dipindah ke Mojokerto, dan akhirnya dipenjara di Koblen Surabaya. Kiai

⁷⁸Saifuddin Zuhri, *Guruku Orang-orang Pesantren* (Bandung: al-Maarif, 1977), 142.

Hasyim Asy'ari dipenjara selama tujuh bulan dan baru dibebaskan setelah ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh santri dan beberapa kiai yang dipimpin oleh KH. Wahab Chasbullah dan KH. Wahid Hasyim.

Keluarnya Resolusi Jihad ulama NU juga menandai berlangsungnya peran kiai dalam mempertahankan kemerdekaan melawan tentara Inggris dan Belanda. Fatwa tersebut memotivasi rakyat Surabaya dan Jawa Timur pada umumnya untuk aktif dalam perang tanggal 10 November 1945. Fatwa ulama NU itu berisi: (1) Kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 wajib dipertahankan, (2) Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah wajib dibela dan diselamatkan, meskipun meminta pengorbanan harta dan jiwa, (3) Musuh-musuh Republik Indonesia, terutama Belanda yang datang lagi membonceng tugas-tugas tentara sekutu (Amerika Inggris), dalam hal tawanan perang bangsa Jepang, tentulah akan menggunakan kesempatan politik dan militer untuk kembali menjajah Indonesia, (4) Kewajiban tersebut adalah "jihad" dan menjadi kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam (*fardhu 'ain*) yang berada dalam jarak radius sembilan puluh empat kilometer (jarak di mana umat Islam boleh shalat jama'qasar)...⁷⁹

Dalam hal mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, para kiai NU juga membentuk barisan tentara yang populer dengan sebutan *hisbullah* (tentara Allah) dan *sabilillah* (jalan Allah). Lasykar *hisbullah* dan *sabilillah* ini didirikan menjelang akhir pemerintahan Jepang dengan latihan Cibasurak, sebuah desa dekat Karawang, Bekasi, Jawa Barat. Latihan-latihan ini menghasil-

⁷⁹PWNU Jawa Timur, *Peranan Ulama dalam Kemerdekaan* (Surabaya, PWNU Jawa Timur, 1995).

kan sejumlah tokoh yang di kemudian hari menjadi pemimpin-pemimpin tentara kita. Lasykar hisbullah berada di bawah komando spiritual KH. Hasyim Asy'ary dan secara militer dipimpin oleh KH. Zainul Arifin, sedangkan lasykar sabilillah dipimpin oleh KH. Masykur. Peranan kiai NU juga tidak terbatas pada lasykar hisbullah dan sabilillah, tatapi banyak di antara mereka yang menjadi anggota tentara Pembela Tanah Air (PETA). Sebagaimana diketahui, sebagian tentara nasional berasal dari tentara-tentara PETA. Bahkan, dari enam puluh batalyon tentara PETA, hampir separuhnya adalah kiai.

Dalam hal mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), para kiai NU juga pernah mengambil keputusan penting, yakni keabsahan Soekarno sebagai presiden Republik Indonesia. Sejarah mencatat bahwa Soekarno menjadi presiden bukan melalui pemilihan umum dan karenanya sebagian umat belum memberikan pengakuannya secara formal. Dalam pada itulah, pernah muncul serentetan pemberontakan yang dilakukan baik dari kalangan Islam sendiri, seperti Gerakan Darul Islam (DI)/Tentara Islam Indonesia (TII) pimpinan Kartosuwiryo, maupun gerakan separatis yang dilakukan oleh kelompok Non-Muslin, seperti Republik Maluku Selatan (RMS).

Pada Mei 1952, bertempat di Cipanas Bogor, para kiai NU seluruh Indonesia mengadakan konfrensi alim ulama. Untuk membahas status Soekarno dan para menterinya sebagai pemimpin dalam pandangan Islam. Hasil dari musyawarah itu adalah bahwa Soekarno adalah *Waly al-amr al-dharuri bi al-syaukah* (presiden yang sah dalam keadaan darurat yang secara *de facto* memiliki kekuasaan). Secara lebih detail, hasil konfrensi Cipanas tersebut adalah: *pertama*, presiden sebagai kepala negara serta alat-alat

negara sebagaimana dimaksud dalam UUD (sementara), pasal 44, yakni Presiden, Menteri-mentri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan Negara adalah *Waly al-amr al-dharuri bi al-syaukah*. Kedua, terhadap qadhi-qadhi nikah yang dipilih oleh *Ahl al-hall wa al-'aqd*, seperti halnya yang berlaku di daerah Sumatera Barat, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kabupaten dapat mengesahkan kedudukan para qadhi tersebut selaku petugas Nikah, talak, dan Rujuk (NTR) dan sekaligus melakukan tugas seagai seorang wali hakim.

Dalam rangka penerimaan asas tunggal Pancasila yang secara normatif membatasi ruang gerak politik formal, para kiai NU juga secara seksama mengeluarkan khittah 1926 pada tahun 1984 melalui muktamar NU ke-27 di Situbondo, Jawa Timur. Munculnya khittah ini dapat dihubungkan dengan beberapa faktor, antara lain karena kebijakan Orde Baru awal dekade 1980-an yang memberlakukan Pancasila sebagai asas tunggal.⁸⁰ Dalam khittah itu disebutkan bahwa NU tidak menjadi bagian dari partai politik manapun. Warga NU diperbolehkan menjadi partisipan bagi semua partai politik, tetapi secara institusional NU tidak lagi berurusan dengan kepentingan-kepentingan politik praktis. Setelah khittah ini, perjuangan NU sebagai organisasi sosial-keagamaan lebih diorientasikan kepada masalah dakwah dan kegiatan sosial-keagamaan. Para kiai diharapkan dapat mengurus kembali lembaga pesantren yang sejak awal menjadi pusat transformasi ajaran Islam tradisional.

⁸⁰Lihat peran Kiai Achmad Siddiq dalam proses penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal dalam Martin Van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKiS, 1994), 147.

Akan tetapi, pada perkembangan mutakhir, posisi itu kemudian bergeser tidak seperti pada masa-masa sebelumnya. Belakangan muncul fenomena pergeseran peran religius kiai yang pada dasarnya merupakan pergulatan ideologis antar kelompok kepentingan politik yang secara langsung maupun tidak langsung telah menyentuh kehidupan kiai dan pesantren. Konsekuensinya, peran-peran kultural kiai sebagai kekuatan arus bawah mulai bergeser.⁸¹ Sinyalemen yang berkembang bahwa kiprah kiai dalam dunia politik agaknya menjai suatu hal yang tidak lagi terbantahkan. Sinyalemen ini didukung oleh banyaknya realitas kiai yang terlibat dalam dunia politik pasca masa reformasi.

Pengertian politik dalam pembahasan ini dikaitkan dengan masalah-masalah pemerintahan, kekuasaan, konflik, partai politik atau upaya-upaya yang ditempuh seseorang atau kelompok untuk memperjuangkan kepentingan warga negara. Karena itulah, istilah politik sesungguhnya merangkum pengertian yang luas. Menurut Surbakti, sekurang-kurangnya ada lima pandangan mengenai politik, yaitu:⁸² (1) politik adalah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kepentingan bersama, (2) politik sebagai segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan, (3) politik sebagai segala kegiatan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat, (4) politik sebagai segala hal yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum, dan (5) politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.

⁸¹Ibid.,53.

⁸²Lihat Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 1992), 1-8.

Berbagai pandangan di atas mempunyai relevansi dengan konteks penelitian ini, yaitu terkait dengan otoritas kiai sebagai elit NU atau tokoh masyarakat yang membutuhkan upaya-upaya mempertahankan nilai. Politik sebagai seperangkat alat tertentu mempunyai logika sesuai dengan kemauan yang dikehendaki para elit masyarakat. Kiai sebagai elit masyarakat memerlukan upaya mempertahankan otoritas dan karena itu di antaranya ada yang terlibat memberikan partisipasi politik atau berperan dalam melakukan perubahan sosial di tengah-tengah masyarakatnya. Partisipasi mengandaikan nuansa keaktifan dan kesengajaan. Sedangkan istilah terlibat menggambarkan bahwa kiai sesungguhnya mungkin tidak aktif dan tidak sengaja ikut ambil bagian, tetapi karena posisinya sebagai pihak yang memiliki pengaruh. Posisi inilah yang menarik pihak-pihak tertentu bersaing mendapatkan keuntungan politik.

Kajian ini sengaja menfokuskan perhatian kepada bagaimana kiai memberikan respon terhadap berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat, seperti memberikan pandangannya dalam meletakkan hubungan Islam sebagai nilai yang ada di dalam diri dengan praktik politik. Politik dimaknai sebagai gejala yang serba hadir di tengah kehidupan masyarakat, yang diwarnai oleh perebutan pengaruh. Dalam konteks seperti itu, ajaran Islam yang dipahami kiai tertentu dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pemecahan masalah. Hal ini dapat dipahami karena Islam bukan sekedar petunjuk tentang bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun min Allah*), tetapi juga menyangkut hubungan manusia dengan sesamanya (*hablun min nas*). Kandungan Islam bukan sekedar membahas masalah ubudiyah, tetapi juga berisi tentang muamalah yang berkaitan dengan kepentingan manusia menata

kehidupannya, sebagaimana banyak pandangan dikemukakan tentang hubungan Islam dan politik.⁸³

Dalam kaitan dengan praktik politik warga nahdhiyyin, sebagian pengamat mengatakan bahwa dalam kaitan dengan masalah ibadah, perilaku warga NU dan termasuk kiai-kiainya selalu bertumpuh kepada doktrin-doktrin aqidah Ahlussunah wal Jama'ah.⁸⁴ Doktrin-doktrin itu dibingkai di dalam tiga pilar inti, yaitu bertauhid dengan mengikuti faham Imam al-Asy'ary dan al-Maturidi, berfikih mengikuti salah satu dari empat madhab (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali), dan dalam masalah-masalah tasawuf mengikuti faham yang diajarkan oleh Imam Junaidi al-Baghdadi dan al-Ghazali. Khusus dalam berfikih, kalangan NU mengembangkan literatur-literatur keputusan hukum agama dalam skala yang lebih besar serta cara-cara menyusun pemikiran hukum dengan teori hukum (*ushul fiqh*) yang disusun oleh Imam al-Syafi'i.

[***]

⁸³Lihat karya-karya dalam bahasan penelitian terdahulu, antara lain Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2007); dan Saiful Muzani, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Paska-Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Utama, 2007)

⁸⁴Lihat pembahasan tentang "Kiai dan Paham Ahlussunnah wa al-Jama'ah" dalam Moesa, *Nasionalisme Kiai*, 98.

BAB 4



PILKADA: RUANG PARTISIPASI POLITIK KIAI NU

A. PARTISIPASI KIAI NU DALAM PILKADA

1. Membidani Lahirnya Calon Gubernur

Rabu, 23 Juli 2008 pukul 14.00 WIB, hasil penghitungan suara sementara putaran pertama pemilihan gubernur Jawa Timur baru dimulai. Namun, media massa, cetak dan elektronik, melalui metode hitungan cepat (*quick count*) berlomba menyiarkan prolehan suara dari masing-masing pasangan calon gubernur Jawa Timur periode 2008-2013.

Dari kelima pasangan calon gubernur yang ada, pasangan

Karsa (Soekarwo-Saifullah Yusuf) dan Kaji (Khofifah Indarparawansah-Mujiono) untuk sementara unggul dari lawan-lawanya. Dalam catatan peneliti, melalui tayangan layar kaca salah satu televisi swasta, pasangan Karsa mendapat suara 28% dan pasangan Kaji 26,5%.

Dari pengamatan peneliti menit per menit, melalui berita kecil di bagian bawah layar kaca televisi, perolehan suara masing-masing pasangan calon gubernur tidak banyak berubah. Jika dibulatkan, angka perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adaah: Karsa 28%, Kaji 27,%, SR 21 %, Salam 17%, dan Achsan 7%.

Saiful Mujani, direktur salah satu lembaga penyelenggara survey dengan metode *quick count* ketika berwawancara di Metro TV saat itu memprediksi bahwa prolehan akhir suara masing-masing pasangan calon tidak akan jauh berbeda dari hasil *quick count* yang dilakukan Lembaga Survey Indonesia (LSI) pimpinanya. Artinya, sesuai peraturan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, yaitu jika masing-masing pasangan calon tidak sampai mendapatkan 30% atau lebih dari suara pemilih, maka pemilihan gubernur diulang dengan menggelar pemilihan putaran kedua. Dua dari pasangan calon yang menempati ranking teratas berhak ikut dalam putaran kedua.

Untuk memperjelas ilustrasi tentang prolehan suara putaran pertama 23 Juli 2008 dapat dilihat hasil *quick count* sebagai berikut:

Tabel 3
Penghitungan Cepat Pilkada Jatim
Putaran Pertama Versi Litbang Kompas⁸⁵

No	Nama Pasangan	Jumlah (%)
1	Khofifah – Mujiono	25,36
2	Sutjipto – Ridwan Hisyam	22,19
3	Soenarjo – Ali Maschan Moesa	19,39
4	Achmady – Suhartono	7,55
5	Soekarwo – Saifullah Yusuf	25,51

Memang benar, beberapa hari setelah KPU melakukan penghitungan perolehan suara pemilih secara manual, perolehan suara masing-masing pasangan calon gubernur tidak banyak mengalami perubahan. Pasangan Karsa dan Kaji tetap berada pada ranking pertama dan kedua.

Berdasar hasil perolehan suara itu, maka sesuai peraturan yang berlaku, pemilihan harus diulang kembali dengan cara menggelar pemilihan putaran kedua karena masing-masing calon tidak sampai memperoleh suara 30% atau lebih dari suara pemilih di Jawa Timur, sesuai dengan pasal 107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.⁸⁶

Adapun hasil akhir putaran kedua pemilihan gubernur Jawa Timur pada 4 November 2008 versi KPU adalah sebagai berikut:

⁸⁵Lihat Kompas tanggal 24 Juli 2008

⁸⁶Lihat artikel dengan judul “Resiko Pilkada Putaran Kedua...” yang ditulis Ahmad Makki Hasan dalam Kompas 29 Juli 2008.

Tabel 4
Penghitungan Resmi Putaran Kedua Pilgub
Tahun 2008 Versi KPU Jatim⁸⁷

No	Nama Pasangan	Jumlah (%)
1	Khofifah – Mujiono	49,80
2	Soekarwo – Saifullah Yusuf	50,20

Dalam masa proses penghitungan suara pada putaran pertama secara manual oleh KPU Jawa Timur, Khofifah Indarparawansah, salah seorang calon gubernur, ketika diwawancarai oleh TV One dan Metro TV mengatakan bahwa dirinya tidak banyak waktu mempersiapkan diri dalam pencalonan menjadi gubernur Jawa Timur.

Secara lugas ia mengatakan bahwa praktis hanya dalam waktu tiga bulan saja, ia melakukan persiapan diri "bertarung" memperebutkan kursi orang nomor satu di Jawa Timur. Pernyataan Khofifah Indarparawansah ini mungkin bagi orang asing atau sebagian pengamat luar negeri terdengar agak mengejutkan, tetapi bagi orang Jawa Timur dan terutama para pendukungnya,

Khofifah Indarparawansah bukanlah sosok baru dalam jagat politik nasional. Sepak terjang dan karir politiknya dapat ditelusuri sejak zaman pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi Presiden RI ke-4. Segudang jabatan ia sandang, dari posisi sebagai orang nomor satu di Pengurus Pusat Muslimat (salah satu badan otonom NU) hingga pernah dipercaya Gus Dur memimpin Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.

Pernyataan Khofifah Indarparawansah tentang waktu persiapan minim, tetapi berhasil menyodok menjadi salah satu kandidat

⁸⁷Lihat Kompas tanggal 17 November 2008

kuat dalam bursa calon gubernur Jawa Timur, menjadi satu bahan pertanyaan penting, kira-kira apa yang terjadi di balik peristiwa itu?

Kalau sekiranya ada pihak yang memberikan pemakluman atas prolehan suara yang diraih Khofifah Indarparawansah, dengan menjawab bahwa prestasi itu lebih disebabkan oleh karena dia adalah kandidat dari NU dengan rasionalisasi bahwa suara mayoritas pemilih Jawa Timur adalah orang-orang NU, maka pertanyaan tandingan akan muncul: Mengapa calon lain yang sama-sama berasal dari kalangan NU, seperti Ali Maschan Moesa yang berpasangan dengan Soenarjo (Salam) dan Achmady yang berpasangan dengan Suhartono (Achsan), tidak memperoleh suara signifikan, seperti halnya suara Khofifah Indarparawansah dengan pasangannya, atau setidaknya tidaknya mengimbangi?

Bagi peneliti dan orang Jawa Timur umumnya, memahami makna posisi memperebutkan kursi orang nomor satu di Jawa Timur, bukanlah sesuatu yang sulit. Untuk mencari makna-makna yang tersembunyi dibalik keberhasilan Khofifah Indarparawansah, peneliti lebih jauh melihat ke dalam, dengan mencari jawaban atas pertanyaan: Siapa pihak yang berpartisipasi di balik pencalonan dirinya menjadi kandidat gubernur? Pertanyaan ini peneliti lanjutkan lagi dengan butir pertanyaan: Apa alasan pihak ini mengajukan Khofifah Indarparawansah menjadi calon gubernur dan harus dipilih oleh warga NU?

Dari hasil wawancara dengan Gus Aab peneliti memperoleh jawaban bahwa majunya Khofifah Indarparawansah tidak dapat dilepaskan dari peran yang dimainkan para kiai NU di jajaran Suriyah NU Jawa Timur, di mana dirinya juga berpartisipasi membidadani kelahirannya. Dalam perbincangan dengan peneliti, Gus Aab

pernah mengatakan hal sebagaimana berikut:

Secara kelembagaan NU adalah organisasi netral dalam berpolitik, tetapi orang-orang NU harus menentukan pilihannya. Dalam posisi seperti itu, warga NU tidak lagi netral karena mereka harus menentukan pilihan pemimpinnya. Warga NU yang banyak jumlahnya dan sebagian besar adalah orang awam belum memahami betul tentang hak-hak yang mesti diperolehnya, sebagai warga negara dan sebagai warga NU secara organisatoris.

Mereka belum mampu mempertanggungjawabkan dan menimbang berbagai kebutuhan NU yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin, sesuai dengan tujuan organisasi NU didirikan para kiai. Oleh karena itu, mereka membutuhkan arahan dari kiai dalam menentukan siapa yang layak dipilih menjadi seorang pemimpin. Inilah yang menjadi alasan penting keterlibatan saya berpartisipasi dalam melahirkan pasangan calon gubernur yang layak menjadi pemimpin Jawa Timur.⁸⁸

Apa yang terpenting dari gagasan melahirkan pasangan Khofifah Indarparawansah-Mujino bagi Gus Aab adalah tidak bercampurnya nama institusi NU, tetapi atas nama pribadi yang diperuntukkan demi kepentingan warga Nahdliyyin. Untuk mempertegas visinya ini, Gus Aab mengatakan bahwa seharusnya seluruh amal usaha, perilaku, kegiatan, dan perbuatan yang dilakukan oleh warga NU, termasuk di dalamnya para kiai dan pengurusnya, harus diupayakan mengarah kepada pencapaian satu tujuan didirikannya NU.

Oleh karena itu, dalam berpolitik pun Gus Aab mengatakan kepada peneliti, agar warga NU berada dalam satu wadah untuk mengarah kepada satu tujuan. Tujuan yang dimaksud Gus Aab

⁸⁸Wawancara, Oktober 2008.

adalah “berlakunya ajaran Islam Ahlussunah wal Jama’ah di masyarakat dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia”.⁸⁹

Ketika peneliti menanyakan kepada Gus Aab, mengapa orang NU harus memilih posisi pasangan yang gubernurnya dari NU, bukan cukup wakil nya saja yang berasal dari NU? Ia mengatakan bahwa cara berfikir kita sekali lagi harus untuk kepentingan organisasi.

“Kalau pertimbangan personal dijadikan sebagai acuan, maka NU secara organisasi tidak akan mendapatkan apa-apa. Sudah ada banyak kasus yang dapat kita jadikan sebagai contoh”, demikian dikatakan Gus Aab ketika menjelaskan tentang ketidakberdayaan seorang wakil bupati dari kalangan NU yang digandeng oleh seorang bupati bukan dari kalangan NU.

Gus Aab menegaskan yang paling berkuasa tentang penggunaan anggaran daerah adalah seorang kepala, bukan seorang wakil. “Apa yang dapat diperbuat oleh seorang wakil kalau SK kepala sudah berada di tangan orang lain”, demikian Gus Aab menggambarkan pentingnya gubernur dari NU.

2. Menentukan Kriteria Calon Gubernur

Banyaknya calon gubernur yang tampil dalam memperebutkan kursi orang nomor satu di Jawa Timur, menjadi perhatian tersendiri dari publik, khususnya para pengamat politik. Sebagian pengamat memprediksi bahwa calon gubernur yang akan keluar sebagai pemenang dalam Pilkada Jawa Timur adalah calon yang mampu menggait suara dari basis massa nahdliyyin.

Kantong-kantong suara warga nahdliyyin menurut pengamat politik Jawa Timur berada di wilayah tapal kuda, seperti Banyu-

⁸⁹Wawancara, November 2008.

wangi, Jember, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Pasuruan, dan ditambah lagi dengan basis wilayah santri di pesisir Utara Jawa Timur, seperti wilayah Gresik, Lamongan, dan hingga Tuban.

Demikian pula, basis NU sebagian besar berada di wilayah Madura, mulai Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan hingga Sumenep. Sedangkan wilayah mataraman yang berada pada posisi wilayah Jawa Timur bagian Tengah dan Selatan, seperti Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Blitar, Malang dan seterusnya, oleh pengamat dikatakan bukan merupakan basis dari warga nahdliyyin. Di wilayah ini suara warga nahdliyyin dikatakan sebagian pengamat tidak terlalu signifikan.⁹⁰

Fakta tentang banyaknya suara warga nahdliyyin yang tersebar luas pada kantong-kantong wilayah sebagaimana tersebut atas, bukan hanya diakui oleh pengamat politik di Jawa Timur, tetapi juga disadari betul oleh para kiai NU sebagai potensi besar umat. "Jika potensi yang besar ini dapat diorganisir dalam satu garis perjuangan, maka niscaya akan dapat melahirkan manfaat lebih besar bagi umat, khususnya bagi warga nahdliyyin di Jawa Timur". Demikian pernah diungkapkan Gus Aab dalam sesi wawancara dengan peneliti.⁹¹

Untuk tujuan seperti itulah, Gus Aab bersama para kiai NU lain, berijtihad politik merumuskan beberapa kriteria calon gubernur yang dianggap layak dalam mengemban amanat. Ijtihad politik di sini dimaknai oleh Gus Aab bukan semata-mata untuk merealisasikan kepentingan politik murni, tetapi ijtihad politik yang

⁹⁰Disarikan dari wawancara Kacung Marijan di TV One tanggal 23 Juli 2008.

⁹¹Wawancara November 2008.

di-dasarkan kepada kriteria syar'i,⁹² sebagaimana telah diajarkan oleh tokoh-tokoh NU masa sebelumnya.⁹³

Tentu, dengan amat sangat mempertimbangan berbagai kekuatan politik yang dimiliki para kader NU. Mempertimbangkan kekuatan politik yang dimiliki para kader NU yang ikut dalam pencalonan diri sebagai gubernur Jawa Timur sangat penting, karena menurut Gus Aab, "tidak semua kekuatan-kekuatan politik itu menguntungkan warga NU".

Kepada peneliti, Gus Aab secara tidak langsung pernah mengatakan mempunyai rasa khawatir dengan banyaknya kader NU yang ikut "terjun" memperebutkan posisi sebagai gubernur Jawa Timur. Kekhawatiran dimaksud tidak berhubungan dengan kapasitas Gus Aab secara pribadi, tetapi terkait dengan kepentingan warga NU, sebagai warga masyarakat terbesar di Jawa Timur.

Untuk mempertegas pandangannya ini, Gus Aab mencontohkan beberapa daerah kabupaten di Jawa Timur yang sudah selesai menyelenggarakan Pilkada. Warga NU yang besar jumlahnya di daerah tersebut hanya dijadikan sebagai lumbung suara dalam pemilihan kepala daerah.

Namun, setelah para calon yang didukung oleh warga NU tersebut jadi, mereka melupakan janji-janji politik yang disampaikan pada saat melakukan kampanye. Daerah kabupaten yang di-

⁹²Kriteria syar'i menurut Gus Aab antara lain: yang paling baik di antara calon, yang paling sedikit kejelekan di antara calon, yang sekiranya berkomitmen terhadap ajaran ASWAJA, yang bersinergi dengan kepentingan warga nahdliyyin.

⁹³Lihat bahasan bab II tentang keterlibatan para tokoh NU dari sejak masa penjajahan hingga masa kemerdekaan. Bahkan tokoh-tokoh NU juga ikut berjuang mempertahankan Negara Republik Indonesia dari serangan luar dan separatisme dari dalam.

ceritakan oleh Gus Aab kepada peneliti antara lain Kabupaten Lamongan dan Bojonegoro. Warga dari kedua kabupaten ini dikenal sebagai mayoritas NU, di mana mereka mendukung salah satu calon bupati yang bukan berasal dari NU. Walhasil, setelah calon yang mereka dukung jadi, banyak janji yang diingkari.⁹⁴

Ketika ditanya tentang siapa calon yang paling pantas memimpin Jawa Timur selama lima tahun ke depan? Seraya menggeser tempat duduknya Gus Aab menjawab bahwa yang paling pantas menjadi gubernur Jawa Timur untuk lima tahun ke depan adalah kader-kader terbaik NU yang mempunyai kapabilitas dan berkomitmen kuat memperjuangkan kepentingan-kepentingan organisasi NU.

Terhadap pencalonan Khofifah Indarparawansah, di mana dia ikut berpartisipasi di dalamnya, Gus Aab memberikan pandangan-pandangannya, terutama dalam mensikapi anggapan-anggapan sementara dari sebagian kalangan yang mengharamkan tampilnya seorang calon gubernur perempuan. Pandangan-pandangan yang mengharamkan itu menurut Gus Aab lebih banyak disebabkan oleh latar belakang dan kepentingan politik tertentu.

Dalam pandangan Gus Aab, "masalah pemimpin perempuan adalah wilayah khilafiyah". Ditambahkan olehnya, "perdebatan masalah itu lebih tepat diletakkan kepada model kepemimpinan yang bersifat individual dan mempunyai kekuasaan mutlak, bukan pada kepemimpinan yang bersifat kolektif seperti selama ini ada di Indonesia, di mana seorang pemimpin mempunyai wilayah masing-masing.

Pemimpin politik di Indonesia, seperti bupati, gubernur, dan presiden menurut Gus Aab adalah para pemimpin kolektif. Di

⁹⁴Wawancara, November 2008

samping para pemimpin itu mempunyai wakil-wakil, juga ada bidang kekuasaan dalam wilayah lain, seperti kekuasaan legislatif dan yudikatif yang dipimpin oleh orang lain. Masing-masing mempunyai kekuatan sebagai penyeimbang. Dalam menjelaskan masalah di seputar kepemimpinan ini, Gus Aab mengatakan:

”Kalau kita kembalikan kepada standar Islam, sebenarnya bukan hanya standar laki-laki, tetapi ada syarat lain yang harus dipenuhi seperti keadilan, *’alimun bi mashalih al-’ibad* (mengerti tentang kemasalahatan hamba), syarat kejujuran, syarat kebersihan dan seterusnya. Semua syarat itu harus dipenuhi, bukan satu syarat saja yang dikedepankan.

Sedangkan alasan sebagian besar para kiai dan pengurus NU mendukung pasangan Kaji adalah lebih disebabkan karena alasan kejam’iyyahan. Yang kita dukung sebenarnya bukan orangnya, tetapi kepentingan NU-nya. Seandainya ada yang menjadi representasi NU, yang sekiranya mampu dan bisa diterima oleh masyarakat Jawa Timur, maka itulah yang akan kita dukung. Jadi bukan karena Khofifahnya.

Dari awal kita sudah melihat bagaimana peluangnya Pak Ali Maschan, tetapi ketika kita tempatkan sebagai yang nomor satu tidak mau. Padahal, dia merupakan kader potensial dalam melaksanakan tugas, dan dalam perjalanan waktu terjadi polemik yang akhirnya berujung pada pemberhentian dia dari pengurus NU.

Kemudian kita melirik kepada Pak Achmady yang asli orang NU dan tokoh NU, tetapi karena perhitungan angka untuk menang itu sulit. Kenapa? Karena partai yang mengusungnya pecah dan statusnya masih tokoh lokal yang belum banyak dikenal oleh masyarakat Jawa Timur. Nah, karena itu kita mencari alternatif.

Munculnya Khofifah pada waktu itu bukan karena keinginan-

nya sendiri, tetapi lebih disebabkan dorongan dari orang-orang NU, untuk mewakili aspirasi orang-orang NU agar tersalurkan dalam satu wadah. Jadi cara berfikir kita lebih pada kepentingan organisasi, bukan kepentingan personal”.⁹⁵

Menanggapi munculnya beragam aspirasi tokoh-tokoh NU, terutama memasuki pemilihan gubernur putaran kedua (terpecah kepada pasangan Karsa dan pasangan Kaji), Gus Aab menerimanya secara wajar.

Sebab perbedaan itu terjadi di mana-mana, bukan hanya ada pada wilayah politik, tetapi juga biasa terjadi di wilayah fiqih dan teologi. Khusus perbedaan dalam wilayah politik, Gus Aab menyitir satu *guyonan*, “perbedaan politik bisa muncul karena perbedaan pendapatan”,⁹⁶ tetapi buru-buru ia kembali menegaskan bahwa itu hanya *guyonan*.

Baginya yang terpenting dari munculnya perbedaan dalam mendukung pasangan calon gubernur bukan terletak pada jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, tetapi lebih kepada kepentingan organisasi NU. Menurut Gus Aab, “hal itu bisa dilihat dari siapa yang akan ditempatkan sebagai orang nomor satu, apakah dia pernah di NU, apakah dia pengamal Ahlussunnah wal Jama’ah, apakah dia punya komitmen menjalankan agama, jangan-jangan membaca al-fatihah saja tidak mampu”. Inilah beberapa kriteria yang diajukan Gus Aab. Semua kriteria itu diperuntukkan bagi kepentingan warga NU, bukan kepentingan personal.

⁹⁵Wawancara Oktober 2008

⁹⁶Kata Gus Aab, *guyonan* ini memunculkan teori *al-hukmu yadurru ma’a ujratihi qillatan wa katsratan* (hukum itu tergantung upahnya, kecil atau besar)

3. Menentukan Kendaraan Politik

Akhir Januari 2008, pasca pelantikan pengurus wilayah NU Jawa Timur—hasil Muskerwil di Pesantren Zainul Hasan Genggong Porobolinggo—dilaksanakan di gedung NU Jalan Gayungsari Surabaya, muncul wacana tentang bakal calon gubernur dari NU.⁹⁷ Wacana ini sebenarnya sudah lama ada, tetapi semakin santer setelah media massa ikut melansir perkembangan yang terjadi di dalam internal pengurus NU wilayah Jawa Timur.

Wacana itu sempat peneliti catat karena dalam waktu bersamaan sudah bermunculan para calon yang sudah diusung oleh partai politik tertentu, seperti Achmady—pada saat itu belum juga menentukan pendampingnya—diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) yang diusung oleh Partai Demokrat (PD), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Beberapa saat setelah Ali Maschan Moesa dilantik menjadi Ketua Umum Tanfidiyah NU Jawa Timur, terjadi polemik hebat di dalam internal pengurus NU. Polemik itu konon dipicu oleh majunya Ali dalam bursa pencalonannya sebagai wakil gubernur mendampingi Soenarjo yang diusung Partai Golkar.

Majunya Ali menurut Gus Aab dan para kiai di jajaran Suriah NU sebagai pelanggaran terhadap kontrak jam'iyah yang pernah ditanda tangani oleh Ali pada Muskerwil di Pesantren Genggong. Kontrak itu berisi larangan bagi pengurus NU yang terlibat dalam kegiatan politik praktis, seperti ikut serta mencalonkan diri menjadi gubernur atau wakil gubernur Jawa Timur.

⁹⁷Peneliti pada saat itu ikut terlibat dalam acara pelantikan pengurus wilayah NU yang dihadiri oleh hampir semua elemen NU di Jawa Timur.

Sesuai kontrak jam'iyah, Gus Aab dan beberapa kiai dalam jajaran Suriyah NU menuntut Ali agar mundur sebagai Ketua Umum Tanfidiyah karena masuk dalam kategori berhalangan tetap, tetapi Ali menolaknya dengan alasan tidak melanggar AD/ART organisasi. Ali lebih memilih jalan untuk berhenti sementara (non-aktif). Polemik itu berakhir dengan dicopotnya Ali dan digantikan oleh KH. Mutawakkil.⁹⁸

Berita yang tak kalah menarik dari polemik antara Ali dengan para kiai di jajaran Suriyah NU Jawa Timur adalah munculnya pemberitaan media tentang sosok Khofifah Indarparawansah yang mulai dilirik para kiai NU. Sebelum media ramai memberitakan masalah ini, kepada peneliti Gus Aab bercerita bahwa dirinya dan beberapa orang kiai NU akan bertemu dengan KH. Hasyim Muza-di di Sidoarjo.

Materi pertemuan dengan KH. Hasyim Muzadi adalah soal pencalonan Khofifah Indarparawansah menjadi gubernur Jawa Timur dan sekaligus juga menentukan kendaraan politik yang akan digunakan untuk maju dalam bursa pencalonannya. Dari pertemuan itu diputuskan bahwa melalui PPP dan partai-partai kecil seperti Partai Patriot dan partai-partai non-parlemen lainnya, Khofifah In-darparawansah maju dalam bursa calon gubernur Jawa Timur.

Terhadap kapasitas dirinya sebagai pengurus wilayah NU Jawa Timur, yang ikut berpartisipasi dalam menentukan kendaraan politik bagi pencalonan Khofifah Indarparawansah, Gus Aab mengatakan bahwa hal itu bukan merupakan pelanggaran khittah, karena secara individu kita harus berpolitik, politik yang dimak-

⁹⁸Dicopotnya Ali dari kepengurusan NU Jawa Timur juga diikuti dengan pencopotan tim suksesnya dari kepengurusan NU wilayah.

sud Gus Aab disini adalah politik yang harus diarahkan untuk tujuan-tujuan bersama.

"Sekarang ini banyak orang lain yang memainkan makna khittah untuk menghantam orang NU. Kalau pengurus NU mengajak warganya berfikir untuk jam'iyah NU, maka dikatakan melanggar khittah. Tetapi, kalau ada orang lain yang melakukan intervensi serta mengacak-acak NU dikatakan tidak ada persoalan pelanggaran dengan khittah", kata Gus Aab. Ditambahkan olehnya bahwa masalah seputar khittah sengaja dimunculkan pihak tertentu, termasuk sebagian orang NU yang tidak memahami makna khittah.

Dalam mempertegas keterlibatannya menentukan kendaraan politik bagi pasangan calon gubernur, Gus Aab mengatakan:

Kita memang terlibat dengan masalah penentuan kendaraan politik itu. Namun, kebetulan posisi saya tidak menjadi tim sukses secara formal karena tim sukses formal harus dilaporkan ke KPUD. Saya hanya disertai tugas mengurus warga NU melalui struktur NU, melakukan pendekatan-pendekatan, memberikan pemahaman-pemahaman kepada warga.

Posisi saya di sini sebagai wakil koordinator di Jawa Timur. Wilayah gerak kita adalah bagaimana memberikan penjelasan kepada warga NU bahwa NU butuh seorang gubernur. Tujuan saya dan tim ini adalah jangan sampai suara warga NU tersebar kemana-mana, tanpa ada pengarahan. Mengapa, sebab kalau itu terjadi, maka warga NU tidak mempunyai nilai tawar, kita dianggap sebagai pribadi-pribadi. NU secara institusi tidak akan dihargai, tidak punya bargaining karena netral secara terus-menerus.

Dalam posisi seperti itu, NU tidak akan pernah dilibatkan dalam menentukan kebijakan-kebijakan. Padahal NU membutuhkannya ketika hendak melakukan pemberdayaan ke-

pada masyarakat, masyarakat Jawa Timur adalah Islam yang Islam adalah nahdliyyin. Oleh karenanya harus kita ambil bagian itu. Jadi kita berpolitik itu berpolitik secara kebangsaan.⁹⁹

Dari ungkapan di atas, dapat dipahami bahwa makna keikutsertaan Gus Aab dalam menentukan kendaraan politik bagi pasangan Khofifah Indarparawansah dan wakilnya melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan partai-partai politik kecil non-parlemen adalah lebih disebabkan oleh karena tanggung jawabnya sebagai orang NU.

Hal ini menurut Gus Aab sekaligus menjadi *i'tibar* karena dalam sekian banyak kasus Pilkada di Jawa Timur, warga NU banyak yang dirugikan. Masalah ini terjadi karena kesalahan di dalam menentukan calon yang didukung dengan kendaraan politik yang kurang mempunyai sinergi dengan kepentingan-kepentingan warga NU.

Gus Aab juga menegaskan pentingnya kewaspadaan warga NU dalam menentukan kendaraan politik calon yang akan didukung dengan ungkapan kalimat, "jangan semata-mata karena ada uang cash di awal kemudian kita memberi dukungan, tetapi di akhir kita tidak pernah dilibatkan dalam menentukan kebijakan".

4. Melarang Melakukan Tindakan Golput

Jumlah warga yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) dalam pelaksanaan putaran pertama pemilihan gubernur Jawa Timur 2008 mencapai angka 40% bahkan lebih dari total pemilih.

Tingginya angka golput itu disinyalir oleh sebagian pengamat politik di Jawa Timur sebagai gagalnya pendidikan politik warga.

⁹⁹Wawancara Oktober 2008.

Anggota tim seleksi KPU Jawa Timur yang juga pakar komunikasi Universitas Airlangga, Suko Widodo, mengatakan bahwa kegagalan ini lebih disebabkan karena keberadaan tokoh politik yang kurang mampu memberikan pesan untuk membuat publik bergairah mengikuti proses pemilihan gubernur.

Selain Suko, Ayu Sutarto, guru besar Universitas Jember dalam sesi acara yang digelar SCTV-Litbang Kompas di Surabaya mengatakan, "apabila Pilkada Jatim putaran kedua terjadi, calon gubernur yang berhasil merebut kepercayaan golput bisa dipastikan memenangkan Pilkada putaran kedua".¹⁰⁰

Nada sama dari hampir seluruh pengamat politik dan budaya di Jawa Timur tentang tingginya angka golput dalam pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2008 tidak bisa dilepaskan dari kurangnya komunikasi tokoh politik dalam melihat perbedaan latar belakang pemilih. Isu yang dikembangkan tokoh politik dalam kampanye kadang kurang dapat menyentuh kebutuhan-kebutuhan warga sesuai dengan karakteristik warga di wilayahnya.

Besarnya angka golput juga disinyalir karena "ngadatnya" mesin politik yang mengusung pasangan calon gubernur. Masalah ini pernah diangkat oleh beberapa media massa dengan mencoba membuat klasifikasi tentang latar belakang pemilih dan kecenderungan memilih pasangan calon gubernur.

Masalah jender sering luput pula dari perhatian tim sukses pasangan calon dalam memenangkan Pilkada. Padahal, jajak pendapat terhadap pemilih sesaat setelah memberikan suaranya (*exit poll*) memberi gambaran masih lekatnya suara para pemilih dengan aspek-aspek primordial, seperti masalah jender, etnis, dan

¹⁰⁰Periksa diskusi bertema "Tlatah Budaya Politik Jawa Timur" dalam Kompas 24 Juli 2008.

agama.

Tabel 5
Hasil Pilkada Putaran Pertama
Berdasar Latar Belakang Versi Litbang Kompas¹⁰¹

No	Nama Pasangan	NU (%)	Muhamadiyah (%)	Agama Lain (%)	Prempuan (%)	Laki-Laki (%)
1	Kaji	24,5	21,3	17,6	34,1	23,9
2	SR	16,2	13,1	35,3	15,4	21,2
3	Salam	17,2	24,6	14,7	17,2	19
4	Achsan	9,1	3,3	-	6	7,2
5	Karsa	25,0	37,7	32,4	27,3	28,7

"Pencerahan politik kepada seluruh warga masyarakat NU", Gus Aab lebih suka disebut dengan kalimat seperti itu dari pada disebut melakukan kampanye dalam mengajak warga yang enggan menyalurkan aspirasinya atau dikenal dengan istilah golput (golongan putih).

Dalam berbagai kesempatan, ia mengaku selalu mengajak kepada seluruh warga NU untuk siap berpartisipasi menyalurkan suara dalam Pilkada Jawa Timur. "Orang NU tidak boleh golput", sepenggal kalimat itu diungkapkan Gus Aab kepada peneliti karena pentingnya aspirasi politik orang NU disalurkan.

Persoalan pentingnya menyalurkan aspirasi ini menurut Gus Aab bukan semata-mata untuk pemilihan gubernur, tetapi juga untuk pemilihan-pemilihan lain, seperti pemilihan presiden.

"Bagaimana warga NU berfikir untuk kepentingan jam'iyahnya, yang kepentingan jam'iyah itu dirumuskan bersama-sama

¹⁰¹Lihat Kompas 25 Juli 2008.

oleh warga lewat perwakilan mereka yang ada di kepengurusan sesuai dengan tingkatannya”, demikian dikatakan Gus Aab menanggapi kecenderungan naiknya angka golput pada pemilihan gubernur Jawa Timur, yang dalam catatan media hingga mencapai angka 40%.¹⁰²

Ilustrasi tingginya angka golput dalam pelaksanaan pemilihan gubernur Jawa Timur 2008 putra pertama adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Prediksi Golput Pilgub Jatim Tahun 2008
Berdasar Tlatah Versi Litbang Kompas-SCTV¹⁰³

No	Nama Tlatah	Partisipasi (%)	Golput (%)
1	Matararaman Pesisir	61,9	38,1
2	Mataraman	60,7	39,3
3	Arek	61,2	38,8
4	Madura	62,4	37,6
5	Pendalungan	58,7	41,3
6	Banyuwangi/Osing)	63,4	36,6

Ketika disodori pertanyaan: "Siapa calon gubernur yang akan dipilih"? Gus Aab menjawab, "tugas saya hanya memberikan pencerahan-pencerahan politik. Saya bahkan tidak pernah menyebut nama, apalagi membawa atribut dan gambar. Itu tugas tim sukses yang secara formal dibentuk pasangan calon gubernur".

Dalam kapasitasnya sebagai pengurus NU, Gus Aab mengaku bahwa ia hanya sebatas menyebut kriteria-kriteria yang harus

¹⁰²Lihat Kompas 24 Juli 2008.

¹⁰³Lihat Kompas 24 Juli 2008

dipilih oleh warga NU. Bagi orang NU yang cerdas sudah pasti akan memahaminya, kecuali bagi yang tidak mengerti.

Ia menambahkan bahwa pencerahan politik tidak sebatas memasang atribut dan tanda gambar, tetapi yang penting adalah bagaimana pikiran kita ikut mewarnai dan dapat diterjemahkan orang.

Untuk mempertegas visinya dalam melakukan pencerahan politik kepada warga selama masa-masa kampanye, Gus Aab mengatakan:

Dalam melakukan pencerahan politik, saya tidak pernah memasang tanda gambar di rumah dan atribut lain di mobil saya. Kenapa? Karena saya tidak mau menjual sosok saya, diri saya, pribadi saya, fisik saya untuk dikenal bahwa saya mendukung salah satu pasangan calon.

Tetapi saya hanya ingin melakukan pencerahan-pencerahan kenapa harus ini yang saya dukung, bukan kenapa saya harus mendukung ini, sehingga inipun bisa berubah ketika orangnya sudah tidak sejalan lagi dengan NU.

Jadi, tidak dukungannya yang bersifat paten kepada orang, tetapi kita paten mendukung kepada visi, misi yang kira-kira bisa menampung aspirasinya orang NU dan ada program yang berkesesuaian dengan kepentingan orang NU. Artinya, di sini saya bergerak pada kepentingan organisasi.... Jadi sebaiknya warga NU tidak memilih cara golput”.¹⁰⁴

Pada struktur masyarakat tingkat bawah, Gus Aab merasa tidak rela kalau mereka dibodohi sebagian elit dengan alasan mengikuti jejak para kiai-ulama tanpa ada visi dan misi yang jelas, semata-mata hanya untuk diajak mendukung kepentingan pihak-pihak tertentu.

¹⁰⁴Wawancara November 2008.

Pencerahan politik juga tidak semata-mata Gus Aab lakukan kepada warga masyarakat tingkat bawah, tetapi juga ia lakukan kepada para pejabat publik. Bentuk pencerahan kepada para pejabat publik adalah dengan cara memanggil mereka yang mempunyai ikatan emosional kuat dengan NU.

Pejabat publik ini kata Gus Aab terdiri dari mereka yang tergabung dalam FOSMIDA (Forum Silaturahmi Pimpinan Daerah). Forum ini beranggotakan para bupati dan walikota. Selain mereka itu, forum ini juga beranggotakan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mempunyai ikatan emosional kuat dengan NU. Mereka biasanya bertestimoni dan curhat karena selama ini jarang dilibatkan dalam pengambilan kebijakan.

5. Mencegah Politik Uang dan Kecurangan

"Laporan dana kampanye tidak wajar", berita ini menghiasi halaman muka beberapa media massa nasional yang beredar di Jawa Timur, menanggapi laporan besaran dana kampanye yang dilakukan para calon gubernur Jawa Timur.

Pakar ilmu hukum Universitas Airlangga, Radian Salman, menilai bahwa besaran dana kampanye yang dilaporkan oleh para calon gubernur sangat tidak masuk akal jika dilihat dari model kampanye-kampanye yang mereka lakukan.¹⁰⁵

"Uang" dan "politik", dua kata yang hampir selalu tampil bergandengan menjadi fenomena umum menandai setiap proses peralihan kepemimpinan politik di Indonesia, termasuk dalam proses pemilihan gubernur Jawa Timur. Meski sudah ada batasan dan mekanisme yang mengatur diperbolehkan tidaknya menggunakan uang dalam kegiatan politik yang dilakukan para kandidat pemim-

¹⁰⁵Lihat Kompas 31 Juli 2008

pin, tetapi praktik politik uang (*money politics*) dalam proses pemilihan pemimpin politik tetap saja ada.

Praktik ini mengambil modus sangat beragam, dengan dalih bermacam pula, mulai dari memberikan santunan, bantuan, dan hingga praktik kotor berbentuk jual beli suara di tempat pemungutan suara.

Konon, praktik semacam ini sudah menjadi "garam dapur" dalam dunia politik kita. Praktik ini sudah merambah ke mana-mana, dalam seluruh tingkatan masyarakat tanpa terkecuali. Ironi memang, tetapi itulah realitas politik.

Miliaran dan bahkan triliunan rupiah uang beredar khusus untuk mendanai pesta demokrasi rakyat Jawa Timur. Satu triliun dari dana sebesar itu diperkirakan berasal dari anggaran belanja KPU Jawa Timur.

Adapun lima triliun lagi asumsinya berasal dari dana yang dikeluarkan secara rata-rata dari masing-masing kandidat. Achmad Suja'ie, dalam satu artikel yang dimuat Kompas Jawa Timur edisi Seni 28 Juli 2008 mengatakan bahwa dana sebesar itu diakui oleh masing-masing tim pemenang cagub-cawagub untuk kepentingan sosialisasi dan menarik simpati dari 29 juta orang lebih pemilih di wilayah Jawa Timur.¹⁰⁶

Suja'ie menambahkan bahwa sebagai orang awam dia tidak percaya dengan angka sebesar itu karena gaji gubernur dalam satu tahun hanya berkisar 1,2 liliar rupiah. Artinya, angka satu triliun rupiah tidak mungkin bisa ditutupi dari gaji seorang gubernur. Lalu, mengapa semua calon berebut? Benarkah semua itu dilaku-

¹⁰⁶Lihat artikel dengan judul "Jalan Terus Biar Mahal (Tanggapan atas Tulisan Pudjo Sugito)" yang ditulis Ach Suja'ie dalam Kompas 28 Juli 2008.

kan untuk mengabdikan kepada rakyat? Hanya Allah yang tahu.

Pertanyaan lebih lanjut yang perlu dikedepankan dalam konteks ini adalah, kemanakah dana sebesar itu digunakan para kandidat gubernur? Seperti yang tertulis dalam artikel Suja'ie, dari pengakuan beberapa orang tim sukses salah satu calon gubernur dikatakan bahwa penggunaan dana sebesar itu paling awal adalah untuk membayar ongkos "kapal" agar calon gubernur mempunyai kendaraan politik menuju gedung Grahadi.

Selain itu, beberapa kelompok masyarakat, seperti tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda juga tidak luput dari "sangu politik" sang kandidat.¹⁰⁷ Mahalnya biaya pesta demokrasi rakyat Jawa Timur itulah yang mengilhami Pudjo Sugito, dosen Universitas Merdeka Malang, menulis satu artikel yang berisi wacana tentang pelaksanaan Pilkada putaran kedua di Jawa Timur untuk dilaksanakan dengan cara tidak langsung.¹⁰⁸

Dana besar melaksanakan Pilkada menurut Pudjo lebih baik disalurkan kepada rakyat Jawa Timur yang sekitar 7,1 juta hidup di bawah garis kemiskinan. Di samping itu, dengan mengutip hasil survey yang dilaksanakan oleh lembaga independen, pudjo mengatakan bahwa pelaksanaan pesta demokrasi rakyat Jawa Timur telah diwarnai disorientasi dalam menentukan pemimpin.

Menanggapi maraknya praktik politik uang yang berlangsung di tengah proses pemilihan gubernur Jawa Timur, Gus Aab mengatakan:

Kalau orang NU masih berfikir masalah uang, maka jangan harap dapat menjadi pemimpin, karena orang NU itu tidak

¹⁰⁷Ibid.

¹⁰⁸Baca artikel Pudjo Sugito, "Pilkada Putara Kedua Tidak Langsung", dalam Kompas Jatim 25 Juli 2008.

ada yang kaya, kecuali harus menjual dirinya untuk diberi modal orang lain.

Kemudian jangan memilih karena uang, karena kalau itu terjadi, maka menganggap semua urusan sudah selesai di depan. Bagi pihak-pihak yang mengeluarkan uang banyak pasti nantinya akan menuntut uang itu untuk kembali, bagaimanapun caranya. Ini berarti dapat dibaca sejak awal bahwa sudah ada konspirasi untuk melakukan tindakan atau perilaku yang tidak benar. Hal ini sangat tidak mendasakan dalam pendidikan politik.¹⁰⁹

Menyimak apa yang telah disampaikan Gus Aab di dalam isi wawancara di atas, tersirat sebuah pesan bahwa politik uang sangat membahayakan bagi masa depan pemerintahan dan masyarakat secara umum.

Ketika moralitas politik diukur dengan kekuatan uang, maka pendidikan politik bagi warga akan mengalami kegagalan. Masyarakat yang sudah lemah secara ekonomi akan ditambah lagi dengan masalah lain, yaitu lemahnya moralitas dalam berpolitik. Bahkan, yang lebih berbahaya lagi adalah timbulnya permusuhan dan fitnah di antara sesama warga masyarakat. Hal ini dipicu karena sebagian warga ada yang menerima uang, sementara ada warga lain yang tidak mendapat bagian.

Ketidakeadilan pelaksanaan pemilihan yang berlangsung pada putaran kedua juga mendapat komentar panjang dari Gus Aab. Banyak kejanggalan-kejanggalan terjadi di lapangan, sebagaimana dikatakan:

Terus terang disadari betul bahwa kita melawan sebuah kekuatan yang memang tidak kita miliki, di mana salah satu

¹⁰⁹Wawancara Nonember 2008.

pasangan calon bisa memanfaatkan semua lini yang didukung oleh kekuatan tangan besi birokrasi.

Kita hanya berada dalam wilayah emosional rakyat yang kita bangun tanpa dukungan dana yang cukup sehingga untuk membayar saksi saja kita tidak mampu. Akhirnya saksi tidak datang karena yang datang pun dibayar 25 ribu versus 75 sampai 100 ribu.

Jadi kita melawan kekuatan birokrasi yang itu kemudian masuk untuk mempengaruhi kiai dan kiai dilibatkan secara birokratis pula....sehingga muncul apa yang sekarang banyak orang rasakan berupa ketidakfajaran dan ketidakjujuran. Insyaallah semua proses ilmiah menolak.

Ketika kita berbicara tentang masalah *quick count*, ada sekitar lima sampai enam lembaga, dan itu lembaga yang cukup kredibel selama ini, menyatakan bahwa pasangan nomor satu itu unggul. Setelah itu tidak ada pemberitaan lagi karena ditutup dengan kekuatan tangan besi, di mana semua berita tidak boleh muncul.

Saya kira orang-orang yang ada di dunia berita sudah memahami tentang hal itu...Selanjutnya, pemerintah bersamasama dari hari pertama sudah langsung membangun opini supaya jangan menjadikan *quick count* sebagai rujukan. Ada apa dari awal opini ini terus dibangun. Kemudian margin error terus-terus dipersoalkan...".¹¹⁰

Ketidakfajaran, termasuk di dalamnya maraknya praktik politik uang dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan birokrasi pemerintahan, diharapkan Gus Aab tidak akan terulang. Dia menyesalkan hal itu seraya memberi pesan agar para pelaku politik bisa berperilaku lebih fair, tidak hanya sekedar melakukan mobilisasi tanpa melakukan pemberdayaan dan pencerahan politik warga.

¹¹⁰Wawancara November 2008.

Sebab, proses peralihan kepemimpinan yang dilakukan secara tidak fair, tidak akan membawa keberkahan dan kemaslahatan, tetapi akan mendatangkan kemurkahan. Pelajaran berharga, menurut Gus Aab, yang dapat diambil dari proses peralihan ini bukanlah keberhasilan yang sementara sifatnya, tetapi keberhasilan jangka panjang yang dihasilkan dari kedewasaan berfikir dan nurani.

B. POSISI KIAI NU DALAM PILKADA

Deskripsi data-data di atas memberi pemahaman baru tentang peran kiai dalam praktik politik kontemporer. Peran politik kiai dalam proses pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2008 berupa: (1) membidani lahirnya calon gubernur, (2) menentukan kriteria calon gubernur, (3) menentukan kendaraan politik, (4) melarang tindakan golput, dan (5) mencegah praktik politik uang dan kecurangan berpolitik adalah temuan yang berbeda dengan peran dalam konsep kiai pada beberapa lapangan terdahulu.

Misalnya Zamakhsyari Dhofier, yang mengatakan bahwa kiai adalah sebuah gelar yang diberikan masyarakat kepada orang Islam yang memiliki pesantren dan mengajar kitab-kitab klasik kepada santrinya.¹¹¹

Konsep kiai yang dikemukakan Dhofier—didasarkan kepada peran—dalam lapangan ini mendapat tambahan baru bahwa kiai bukan sekedar orang yang memimpin pesantren dan mengajarkan kitab-kitab klasik kepada santrinya, tetapi juga terlibat aktif memperjuangkan kepentingan warga.

Temuan dari lapangan lapangan ini juga menambah konsep

¹¹¹Lihat Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: LP3ES, 1994), 55.

fungsi kiai yang dikemukakan oleh Endang Turmudi: kiai sebagai pelindung, kiai sebagai pendidik, dan kiai sebagai motivator.¹¹²

Pertama, di dalam masyarakat kiai merupakan pelindung karena kiai adalah orang yang paling disegani. Masyarakat akan datang kepada kiai ketika mereka hendak memecahkan persoalan. Dalam hal ini, kiai adalah figur yang berpengaruh dan menjadi rujukan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan.¹¹³

Kedua, hampir semua kiai di Indonesia mempunyai pondok pesantren. Inilah yang mengantarkan kepada pandangan bahwa kiai mempunyai fungsi sebagai pendidik. Endang Turmudi dalam tulisannya juga mengatakan bahwa kiai adalah orang yang mempunyai pengetahuan luas tentang Islam. Hal ini menyebabkan kiai selalu mempunyai pengikut yang banyak, yang senantiasa menghadiri pengajian dan ceramahnya.¹¹⁴

Ketiga, tidak dipungkiri bahwa kiai yang hidup di tengah masyarakat adalah sosok yang sangat lihai dalam pemberi motivasi terhadap munculnya beragam kegiatan masyarakat.

Dibanding temuan sebagaimana disampaikan pada bagian awal sub bahasan ini dapat ditambahkan bahwa kiai bukan hanya sekedar sosok yang berfungsi sebagai pelindung, pendidik, motivator, tetapi kiai juga aktivis sosial yang melakukan pencerahan dalam menghadapi perubahan.

Temuan dalam lapangan ini juga menghadirkan tambahan konsep kategori kiai sesuai dengan peran-peran yang dimainkan di masyarakat. Kategori kiai memang pernah ditulis oleh Endang

¹¹²Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan* (Yogyakarta: LkiS, 2004).

¹¹³Lihat juga dalam Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 23.

¹¹⁴Turmudi, *Perselingkuhan Kiai*, 95.

Tur-mudi dalam empat klasifikasi: kiai pesantren, kiai tarekat, kiai poli-tik, dan kiai panggung.¹¹⁵

Kategori kiai pesantren, yaitu kiai yang mempunyai kegiatan atau memusatkan perhatian kepada aktivitas pengajaran di pesantren dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan; Kategori kiai tarekat, yaitu kiai yang memusatkan perhatiannya kepada upaya membangun kecerdasan hati (dunia batin); Kategori kiai politik, yaitu kiai yang mempunyai perhatian terhadap pengembangan dunia politik praktis; Kategori kiai panggung, yaitu kiai yang biasanya menjadi juru dakwah, yang setiap malam bertugas menyampaikan ceramah agama dari satu tempat ke tempat yang lain.

Dalam klasifikasinya, Turmudi memang telah membagi kiai dalam kategori kiai politik. Namun, ia belum menyebutkan secara detail perilaku-perilaku politik seperti apa yang mendasari lahirnya kategori kiai politik dalam konsepnya.

Oleh sebab itu, lapangan ini ikut menyumbangkan variabel perilaku kiai yang digolongkan Turmudi dalam kategori kiai politik. Beberapa indikator dari variabel "kiai politik" yang dimunculkan dalam tulisan Turmudi menjadi semakin operasional dengan te-muan dalam lapangan.

Misalnya, perilaku kiai yang ikut berpartisipasi membidani lahirnya calon pemimpin, perilaku kiai yang ikut berpartisipasi menentukan kriteria calon pemimpin, perilaku kiai yang ikut berpartisipasi menentukan kendaraan politik, perilaku kiai yang ikut melarang tindakan golput, dan perilaku kiai yang melarang praktik politik uang dan melarang tindakan-tindakan kecurangan dalam

¹¹⁵Ibid., 32-33.

berpolitik.¹¹⁶

Hasil lapangan ini juga bisa dibandingkan dengan studi yang dilakukan oleh Imam Suprayogo tentang keterlibatan kiai dalam kegiatan politik.¹¹⁷ Dalam karyanya, Imam melihat keterlibatan kiai dalam berbagai kegiatan masyarakat secara umum, salah satunya adalah keterlibatan dalam aspek politik pada pedesaan Jawa-Ma-dura Kecamatan Tebon, Malang. Imam menyebutkan bahwa di dalam partisipasi politik, kiai menempuh cara yang berbeda.

Afiliasi politik misalnya dilakukan oleh kiai dengan cara menyokong partai yang mendapat dukungan dari pemerintah. Tindakan ini dilakukan karena keinginan kiai mendapatkan fasilitas pemerintah untuk mengembangkan misi dakwahnya.¹¹⁸

Imam juga memaparkan adanya kiai independen, yaitu kiai yang tidak tergantung pada kemauan pihak lain, yakni kemauan pemerintah. Model kiai ini secara terang-terangan melakukan gerakan massa dalam mendukung partai yang berseberangan dengan partai yang didukung pemerintah. Bentuk keterlibatan tersebut disebut Imam dengan istilah partisipasi aktif kritis. Temuan penting Imam adalah tipologi kiai dalam keterlibatannya di dunia politik, yakni: kiai spiritual, kiai advokatif, kiai politik adaptif, dan kiai politik kritis.¹¹⁹

Kiai spiritual, yaitu kiai yang mengasuh pondok pesantren yang lebih menekankan pada upaya mendekatkan diri kepada Tuhan lewat amalan ibadah; Kiai advokatif, yaitu kiai yang selain me-

¹¹⁶Lihat dalam data-data yang diperoleh dalam penelitian ini.

¹¹⁷Lihat proposisi yang dikemukakan dalam buku Imam Suprayogo, *Kiai dan Politik: Membaca Citra Politik Kiai* (Malang: UIN Press, 2007).

¹¹⁸*Ibid.*, 287.

¹¹⁹*Ibid.*, 119-121

ngasuh pondok pesantren dan aktif mengajar santri di pesantren, juga memperhatikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dan senantiasa berusaha mencari jalan keluarnya; Kiai politik adaptif, yaitu kiai yang selain mengasuh pondok pesantren juga senantiasa peduli pada organisasi politik dan kekuasaan; Kiai politik kritis, yaitu kiai yang bersedia menyesuaikan diri dengan kekuatan dominan dan mengambil posisi kritis karena keberanian mengambil sikap berbeda dengan kekuatan dominan.

Dari tipologi yang disampaikan dengan ciri dan karakteristik sebagaimana tertulis pada pembahasan bab-bab sebelumnya, kiranya perilaku kiai yang menjadi subyek dalam lapangan ini belum mampu terwadahi secara tepat.

Konsep kiai spiritual dalam studi Imam yang menyatakan bahwa kiai adalah sosok yang statis, tertutup dan konservatif jelas tidak mampu mewadahi karakteristik kiai yang dalam lapangan ini yang mempunyai mobilitas dan partisipasi cukup luas di dalam kegiatan politik.

Konsep kiai advokatif dengan karakteristik terbuka, dinamis, dan inovatif memang mempunyai kedekatan dengan temuan tetapi orientasi politik yang tidak tampak, jelas bukan sesuatu yang menjadi tipikal dari karakteristik kiai dalam lapangan ini.

Konsep kiai politik adaptif juga mempunyai tipikal yang jauh dari apa yang ditunjukkan kiai dalam lapangan ini, lebih-lebih pada masalah kedekatan kiai dengan pihak penguasa. Demikian pula dengan konsep kiai politik kritis yang memang mempunyai karakteristik menggunakan politik sebagai instrumen, dekat dengan umat daripada pemerintah, tetapi di sisi lain mempunyai karakteristik tertutup, statis, dan konservatif.

Keterlibatan kiai dalam kegiatan-kegiatan politik berwawa-

san kebangsaan sebagaimana ditemukan dalam data-data lapangan ini memperkuat tesis yang pernah dikemukakan oleh Saiful Mujani, khususnya tentang adanya berbagai unsur dalam Islam dan di-mensi partisipasi politik yang saling berhubungan satu sama lain.

Menurut Mujani, tidak ada satu pun unsur-unsur yang terdapat di dalam Islam bertentangan dengan dimensi manapun dari partisipasi politik. Hampir semua unsur Islam berkorelasi positif dan signifikan dengan semua dimensi partisipasi politik.

Mujani dalam karya lapangannya itu secara spesifik menyebutkan identitas ke-NU-an seseorang... berkorelasi positif dan signifikan dengan aktivitas kampanye dan kerja kemasyarakatan.¹²⁰ Tesis Mujani mempunyai kemiripan dengan hasil lapangan ini, di mana subyek kiai yang diteliti juga menggunakan alasan yang ber-sumber dari nilai ke-NU-an.

Demikian pula apa yang disampaikan Ali Maschan Moesa tentang konstruksi nasionalisme kiai berbasis agama. Karya Ali ini secara umum mengkaji tentang keterlibatan Islam—melalui agen-agensya—sebagaimana agama yang mampu menjadi faktor penting di dalam proses membentuk nasionalisme, di mana hal itu sangat tergantung kepada paradigma yang digunakan dalam memahami ajaran-ajaran agama.

Paradigma yang dimaksud adalah paradigma yang digunakan kiai NU yang dikenal dengan paradigma inklusif, kontekstual dan lebih mementingkan substansi daripada formalnya. Model tersebut menurut Ali mampu mewujudkan visi sosial dan politik ber-

¹²⁰Lihat dalam Saiful Muzani, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Utama, 2007), 270-271.

sama dalam masyarakat Indonesia yang dikenal sangat pluralis. Kenyataan demikian menurut Ali menempatkan posisi Islam sebagai faktor yang mendorong munculnya rasa kebangsaan.¹²¹

Kiranya beberapa hasil wawancara peneliti dengan kiai yang menjadi subyek dalam lapangan juga memaparkan hal demikian. Politik yang dikedepankan kiai dalam lapangan ini bukan model politik murni -tanpa kendali moral- tetapi politik yang dibingkai ke-pentingan hidup berwawasan kebangsaan.

Studi yang dilakukan Hiroko Horikoshi yang menemukan konsep kiai sebagai agen perubahan (*agent of change*) layak kiranya mewadahi karakteritik kiai dalam lapangan ini.

Studi ini dilakukan Hiroko Horikoshi di Cipari, Jawa Barat dan diterbitkan dalam bentuk buku berjudul "Kyai dan Perubahan Sosial",¹²² merevisi temuan Clifford Geertz yang mengatakan kiai sebagai "makelar budaya" (*cultural broker*).¹²³ Menurut Geertz, kiai mempunyai peran sebagai alat penyaring atas arus informasi yang masuk ke dalam lingkungan santri, menularkan apa yang dianggap berguna dan membuang apa yang dianggap merusak bagi me-reka.

Namun, menurut Geertz, peranan kiai sebagai penyaring ini akan macet, ketika arus informasi yang masuk begitu deras dan tidak mungkin lagi dapat disaring oleh kiai. Dalam keadaan demi-

¹²¹Lihat kata pengantar yang disampaikan dalam karya Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2007).

¹²²Periksa karya studi yang dihasilkan oleh peneliti berkebangsaan Jepang, Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1987).

¹²³Lihat dalam Clifford Geertz, *The Javaanese Kijaji: the Changing Roles of a Cultural Broker. Comparative Studies in Society and History* (tt: tp, 1960), 2.

kian kiai akan kehilangan peran dalam perubahan sosial yang terjadi. Akibat peranannya yang semakin sekunder itu, maka kiai akan mengalami apa yang disebut kesenjangan budaya (*cultural lag*).

Horikoshi dalam karya ini juga mengatakan tentang adanya perubahan fungsi dan peran kiai. Dari semula kiai hanya bertugas meneruskan instruksi-instruksi dari luar kepada masyarakat dan sesekali menjadi wakil orang luar memobilisasi masyarakat yang dipimpinnya, tetapi dalam lapangannya Horikoshi melihat adanya kecenderungan yang berubah ketika rezim militer pemerintah mulai meningkatkan kekuasaannya di masyarakat pedesaan.

Kiai telah menampakkan keengganannya untuk berkomitmen dengan partai manapun. Kiai juga dengan hati-hati menjauhi keterlibatannya dalam organisasi-organisasi semi pemerintah, seperti MUI dan Golkar. Menariknya, kiai masih menerima sumbangan pemerintah untuk memperbaiki sarana umum dan perbaikan madrasah. Kiai tidak mengakui dengan tulus rezim penguasa, tetapi masih memandang perlu Repelita, khususnya bidang pembinaan mental.

Posisi kiai yang begitu tinggi ini tidak tergoyahkan di hadapan pejabat pemerintah.¹²⁴ Fakta-fakta tersebut menurut Horikoshi menunjukkan fungsi kiai berperan aktif dalam perubahan sosial. Bukan karena kiai mencoba meredam perubahan, tetapi ia justru memelopori perubahan sosial dengan caranya sendiri.

Dalam posisi seperti ini, kiai tidak hanya sekedar menyaring datangnya informasi-informasi dan modernisasi di dalam masyarakat, sebagaimana dikatakan oleh Geertz, melainkan menawarkan agenda perubahan yang dianggap sesuai dengan kebutuhan

¹²⁴Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*, 234

nyata masyarakat yang dipimpinnya.¹²⁵

Dari berbagai pembahasan, mulai dari temuan-temuan data dari lapangan lapangan hingga membandingkannya dengan beberapa teori yang dikemukakan para pakar di atas, kiranya dapat diajukan beberapa temuan konsep baru dari hasil lapangan ini.

Temuan-temuan yang dimaksud antara lain adalah tentang konsep "kiai politik " yang definisi operasionalnya dapat disebutkan sebagaimana berikut: yaitu kiai yang ikut berpartisipasi dalam membidani lahirnya calon pemimpin politik, menentukan kriterianya, dan menentukan partai mana yang dapat digunakan sebagai kendaraan dalam memperebutkan posisi strategis di wilayah politik untuk kepentingan masyarakat.

Lapangan ini juga menawarkan konsep baru tentang tipologi kiai politik dengan varian dan karakteristik-karakteristik yang berbeda dengan tipologi yang telah disebutkan di dalam berbagai hasil lapangan terdahulu. Tipologi yang dimaksud adalah tipologi "kiai politik advokatif kritis".

Jenis tipologi kiai ini mempunyai karakteristik terbuka, dinamis, inovatif, menjadikan agama sebagai dinamisator, memperjuangkan kepentingan-kepentingan warga, menjaga jarak dengan penguasa, dan menggunakan politik sebagai instrumen dalam perjuangan.

[***]

¹²⁵Lihat pengantar Abdurrahman Wahid, "Benarkah Kyai Membawa Perubahan Sosial?: Sebuah Pengantar." dalam Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1987), xvii.

BAB 5



CATATAN PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari berbagai temuan data yang diperoleh setelah melakukan analisis dan pembahasan-pembahasan yang sudah lakukan, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Partisipasi politik kiai NU Jember dalam pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2008 dilakukan dengan cara ikut berperan serta dalam membidani lahirnya seorang calon gubernur, menentukan kriteria calon gubernur, menentukan kendaraan politik, melarang tindakan golput, mencegah terjadinya politik uang dan kecurangan.

2. Dengan berbagai peran yang dimainkan kiai NU Jember ketika berpartisipasi politik dalam pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2008, maka telah terjadi pergeseran-pergeseran peran kiai dalam politik.
3. Dengan terjadinya pergeseran peran kiai NU Jember ketika berpartisipasi politik dalam pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2008, maka telah terjadi penambahan fungsi kiai dari fungsi sebelumnya.
4. Pergeseran peran dan penambahan fungsi kiai NU Jember ketika berpartisipasi politik dalam pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2008 lebih disebabkan karena keinginan kiai memperjuangkan kepentingan warga NU agar menjadi warga negara yang berdaya di Jawa Timur.

B. REKOMENDASI

Berbagai kesimpulan yang diperoleh mengacu kepada temuan data dari lapangan, baik hasil wawancara dengan sumber utama, observasi di lapangan, dan dokumentasi beberapa sumber yang lain, tentu tidak luput dari kelemahan-kelemahan. Kelemahan itu misalnya saja terjadi pada saat melakukan proses reduksi data dan pengorganisasian data hasil wawancara dengan nara sumber. Juga sangat mungkin terjadi kelemahan disebabkan terlalu cepat dalam mengambil kesimpulan.

Berangkat dari keterbatasan-keterbatasan semacam itu, maka penulis memberi saran agar dilakukan penulisan lebih lanjut, tidak hanya menitikberatkan kepada penulisan tentang pola perilaku kiai dalam mendukung salah satu pasangan calon gubernur. Namun, perlu pula ada data-data pembandingan dari sumber lain yang juga mendukung pasangan calon lainnya.

Dengan kata lain, sangat diperlukan penulisan tentang pola-pola perilaku dan motivasi mendalam yang menjadi dasar lahirnya perilaku kiai berartisipasi politik untuk mendukung salah satu pasangan calon gubernur. Secara umum, diperlukan penulisan terhadap pola-pola perilaku masyarakat dengan berbagai model pendekatan dalam ilmu sosial sehingga melahirkan temuan dan teori baru guna menambah kekayaan intelektual, khususnya bidang ilmu sosial keagamaan.

[***]



DAFTAR PUSTAKA

- Winarno, Budi. 2007. *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Media Pressindo. Yogyakarta
- Sjaiful Rahman, M. 2004. *Perubahan Konstitusi dan Kinerja DPR-RI dalam Era Reformasi*. Yayasan Pancur Siwah. Jakarta
- Yahya Harahap, Mohamad. 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Citra Aditya Bhakti. Bandung
- Anwar, Safi'i. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Bruinessen, Martin Van. *NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- _____. *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia*. Bandung: Mizan,

1992.

- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Dirdjosanjoto, Pradjarta. *Memelihara Umat: Kiai Pesantren – Kiai Langgar di Jawa*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- E Ramage, Douglas. E Ramage, "Demokratisasi, Toleransi Agama dan Pancasila: Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid," dalam *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*. Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Faisal, Sanapiah. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: YA3, 1990.
- Fealy, Greg. *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*. Yogyakarta: LKiS, 1998.
- Feillard, Andree. *NU Vis a Vis Negara Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Geertz, Clifford. "Agama sebagai Sistem Budaya," dalam Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion*. ter. Ali Noer Zaman. Yogyakarta: Qalam, 1996.
- _____. *Kebudayaan dan Agama*, ter. Fransisco Budi Hardiman. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- _____. *The Javaanese Kijaji: the Changing Roles of a Cultural Broker. Comparative Studies in Society and History*. t.tp, tp, 1960.
- Hasan, Ahmad Makki. "Resiko Pilkada Putaran Kedua (Tanggapan atas Tulisan Pudjo Sugito)" Kompas 29 Juli 2008.
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintas Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*. Jakarta: LSIK, 1999.
- Horikoshi, Hiroko. *Kyai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1987.
- Huntington, Sammuel P. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta:

Grafiti Press, 1997.

_____. *The Clash of Civilization. Remaking of the World Order*. New York: Simon and Schuster, 1997.

Ismail, Faisal. *Dilema NU di Tengah Pragmatisme Politik*. Jakarta: Balitbang Agama Depag RI, 2004.

Latif, Yudi. "Ruang Publik, Partisipasi dan Kekerasan,:" dalam Syahdatul Kahfi (ed.), *Terorisme Di Tengah Arus Global Demokrasi*. Jakarta: SPECTRUM, 2006.

Lauer, Robert H. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, ter. Alimandan. Jakarta: Rineka Cipta, 1993

Liddle, William. "Skriptualisme Media Dakwah: Suatu Bentuk Pemikiran dan Aksi Politik Islam di Indonesia Masa Orde Baru," dalam Mark R. Woodward ed. *Jalan Baru Islam: Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*. Bandung: Mizan, 1999.

Miller, Gale. "Case Studies", dalam David Lavinson dan Malvin Ember (ed), *Encyclopedia of Cultural Anthropology*, Vol.4. New York: Henry Holt and Company, 1996.

Moesa, Ali Maschan. *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama*. Yogyakarta: LKiS, 2007.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.

Moore, Himes J.S. *Study of Sociology*. Atlanta: Scoot Foreman, 1964.

Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.

Muhtadi, Asep Saifullah. *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama: Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*. Jakarta: LP3ES, 2004.

Muzani, Saiful. *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Paska-Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Utama, 2007.

- Nasution, S. *Metode Penelitian Kualitatif-Naturalistik*. Jakarta: Tar-sito, 1988.
- Oetomo, Dede. "Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial," dalam Makalah Seminar yang diselenggarakan oleh Balai Kajian Sumber Daya Manusia. Surabaya, FISIP Unair. Oktober 1993.
- Patoni, Achmad *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Patton. Michael Quinn. *Qualitative Research & Evaluation Method*. London: Sage Publications, 2002.
- PWNU Jawa Timur, *Peranan Ulama dalam Kemerdekaan*(Surabaya, PWNU Jawa Timur, 1995).
- Rahmat, M. Imdadun et.al. "Partai-Partai Islam: Transformasi Gerakan Islam dan Ruang Demokrasi," dalam *Tashwirul Afkar*. Edisi No. 4 Tahun 1999.
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Soelaiman, M. Munandar. *Dinamika Masyarakat Transisi: Mencari Alternatif Teori Sosiologi dan Arah Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sugito, Pudjo. "Pilkada Putara Kedua Tidak Langsung", Kompas Jatim 25 Juli 2008.
- Suja'ie, Ach "Jalan Terus Biar Mahal (Tanggapan atas Tulisan Pudjo Sugito)" Kompas 28 Juli 2008.
- Suprayogo, Imam. *Kiai dan Politik: Membaca Citra Politik Kiai*. Malang: UIN Press, 2007.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 1992.
- Turmudi, Endang. *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Ummatin, Khoiro. *Perilaku Politik Kiai*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

2002.

Wahid, Abdurrahman. "Benarkah Kyai Membawa Perubahan Sosial?: Sebuah Pengantar." dalam Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1987.

Warsono, "Wacana Politik Kiai Pada Era Pemerintahan Gus Dur: Apakah sebagai Intelektual Organik atau intelektual Tradisional", Disertasi Doktor, Universitas Airlangga, Surabaya, 2003.

Ziemek, Manfred. *Pesantren dan Perubahan*. Jakarta: P3M, 1986.

Zuhri, Saifuddin. *Guruku Orang-orang Pesantren*. Bandung: al-Maarif, 1977.

[***]



TENTANG PENULIS



AHIDUL ASROR, lahir di Gresik, Jawa Timur pada 6 Juni 1974. Menamatkan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 1987 dan Madrasah Tsanawiyah tahun 1990 di kota Gresik. Peneliti melanjutkan pendidikan di MAN Tambakberas Jombang dan tamat pada tahun 1993. Gelar Sarjana S-1 diperoleh dari Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 1998. Adapun gelar Magister Agama dan Doktor bidang Studi Islam diraih masing-masing pada tahun 2000 dan 2006.

Selama menjadi mahasiswa aktif di Lembaga Senat Mahasiswa, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan, Ketua Pusat Kajian Islam dan Sosial (PKIS) Pascasarjana IAIN Sunan Ampel. Sekarang

tercatat sebagai salah satu dosen tetap di Jurusan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember.

Pengalaman menjabat di STAIN Jember yaitu sebagai Sekretaris Jurusan Dakwah, dan kini menjabat sebagai Ketua Jurusan dakwah STAIN Jember.

[***]

Artikulasi POLITIK KIAI NU

Pada Masa Transisi Demokrasi

Hampir menjelang satu abad lamanya, sejarah perjuangan para kiai dan tokoh-tokoh NU lainnya turut mewarnai arah perjuangan bangsa. Boleh dikatakan, tidak satu pun para pengamat yang menyangsikan peran mereka dalam mengisi hari-hari penting bangsa Indonesia dalam mencari makna dan jati dirinya.

Sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang sosial-keagamaan, NU memang pernah terlibat dalam pergumulan politik. Namun, sejak menyatakan diri kembali kepada garis perjuangannya, NU tidak melarang lagi hak-hak warganya untuk terlibat dalam aktivitas politik.

Fenomena mutaakhir tentang partisipasi politik tokoh-tokoh NU yang sekarang menjadi perbincangan publik adalah keterlibatannya dalam pemilihan gubernur Jawa Timur. Hal ini terutama terjadi pada basis massa NU di wilayah tapal kuda, seperti Jember yang oleh sebagian pengamat disebut menjadi barometer dalam melihat partisipasi politik mereka pada proses pemilihan gubernur Jawa Timur.

Meski kasus studi ini dilakukan pada partisipasi politik pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2008, substansi kajian ini masih memiliki relevansi dengan partisipasi politik kiai dalam pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2013. Bahkan tidak itu saja, termasuk juga pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan bupati, walikota dan lain-lain.



STAIN JEMBER PRESS

Jl. Jum'at 94 Mangli Jember 66136
Telp. 0331-487550 Fax. 0331-427005
Email: stainjember.press87@gmail.com

ISBN 978-602-1640-09-8

